

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sejak awal kemerdekaan hingga pada masa sekarang ini masih terus berusaha meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara dengan cara terus menggiatkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan suatu perubahan yang mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik dari sekarang baik secara material maupun secara spiritual, yang mana tujuan akhir dari pembangunan tersebut adalah meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan bangsa sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Dapat kita katakan juga bahwa pembangunan merupakan realitas fisik dan suatu tingkat atau kondisi mental dimana masyarakat, melalui kombinasi proses-proses kelembagaan, sosial dan ekonomi, berusaha untuk mendapatkan sarana-sarana yang memadai guna mencukupi kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan yang berlangsung di dalam masyarakat paling tidak harus mengandung tiga tujuan sebagai berikut (Todaro,1995:144):

1. Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat.
2. Untuk meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi selain pendapatan yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sarana pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya, yang kesemuanya tersebut tidak

semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan material saja, melainkan juga menciptakan martabat atau harga diri yang lebih besar diantara masing-masing pribadi dan bangsa yang bersangkutan sebagai keseluruhan.

3. Untuk memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masing-masing pribadi maupun negara yang bersangkutan untuk memerdekakan diri dari perbudakan dan ketergantungan pihak lain, tidak hanya dalam hubungannya dengan negara lain tetapi juga dalam kaitannya dengan kebodohan dan kepapaan manusiawi yang membelenggu kehidupan mereka.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut agar pembangunan daerah selaras dengan pembangunan nasional maka perlu dilakukan berbagai kegiatan pembangunan regional yang disesuaikan dengan prioritas, potensi, dan kondisi yang ada di masing-masing daerah yang bersangkutan. GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh kawasan yang kurang berkembang seperti daerah terpencil perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Sehingga sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 yang dijabarkan pada undang-undang no 5/1974 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan

pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dalam membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah serta dilaksanakan dengan dekonsentrasi (K Wantjik Saleh).

Salah satu indikator dari keberhasilan perencanaan daerah secara makro ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan atau kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, sedangkan pertumbuhan PDRB itu sendiri tidak lepas dari peran dari setiap sektor ekonominya, besar kecilnya kontribusi pendapatan di setiap sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan hasil perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pada setiap sektornya yang dilakukan pemerintah daerah. Pergeseran struktur ekonomi yang telah banyak beralih pada pembangunan sektor yang lebih didasarkan pada target yang berorientasi pada pertumbuhan nilai tambah sektoralnya (Zadjuli,1992). Dari tabel 1.1 di bawah ini dapat kita lihat perkembangan distribusi prosentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada setiap masing-masing sektor-sektornya dalam periode 1994 - 2000.

Tabel 1.1

## Distribusi PDRB Propinsi DIY

Menurut Lapangan Usaha atas Harga Konstan 1993

Tahun 1994 – 2000 (Juta Rupiah)

Sektor	1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%
Pertanian	716889	16.45	747526	15.76	795211	15.56	822446	15.56	778139	16.61	817810	16.95	901380	16.96
Pertambangan & pengolahan	64045	0.15	67714	1.43	69960	1.37	71548	1.35	60251	1.29	60476	1.25	60555	1.21
Industri pengolahan	601917	13.81	635002	13.39	694724	13.59	701976	13.28	659816	14.08	682440	14.15	66115	13.24
Listrik gas & air bersih	28327	0.65	30607	0.65	34110	0.67	31374	0.59	31429	0.67	35344	0.73	38128	0.76
Bangunan	422300	9.69	493891	10.42	532827	10.42	552853	10.46	371345	7.92	383269	7.94	400859	7.99
Perdagangan hotel & restoran	676167	15.52	733368	15.42	797939	15.31	828299	15.67	742580	15.85	761008	15.77	791621	15.78
Pengangkutan & komunikasi	502371	11.53	538537	11.36	575293	11.25	593459	11.27	541280	11.55	552812	11.46	609593	12.15
Keuangan	444862	10.21	499920	10.54	544556	10.65	567452	10.73	527472	11.26	531007	11.01	524512	10.45
persewaan & jasa perusahaan	901028	20.68	995338	20.99	1067143	20.88	1116950	21.13	977631	20.86	1000279	20.73	1026947	20.47
Jasa-jasa	4357906	100	4741903	100	5111563	100	5286367	100	4689943	100	4824445	100	5017710	100

Sumber data : BPS Propinsi DIY dalam angka berbagai edisi, data diolah

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita ketahui seberapa besar pengaruh atau sumbangan masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Propinsi DIY, dari tabel tersebut juga dapat kita ketahui perkembangan sektor-sektor yang ada dari tahun 1994 hingga tahun 2000. Nilai distribusi persentase pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sektor yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB Propinsi DIY selama periode penelitian adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa-jasa lainnya.

Sejak tahun 1994 dari keempat sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Propinsi DIY, sektor jasa-jasa lain merupakan sektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusinya pada total PDRB Propinsi DIY selama periode penelitian, mengingat di Propinsi DIY banyak ditawarkan layanan jasa-jasa terutama jasa pendidikan dan pariwisata. Perkembangan kontribusi sektor jasa-jasa lain ini berfluktuatif yaitu sebesar 20,68%, 20,99%, pada tahun 1994, 1995, kemudian turun menjadi 20,88% pada tahun 1996, dan pada tahun 1997 naik menjadi 21,13%, akan tetapi mulai tahun 1998, 1999, dan 2000 peranan sektor ini menurun yaitu sebesar 20,86%, 20,73%, 20,47%, hal ini disebabkan menurunnya perekonomian DIY ketika krisis ekonomi terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang hingga kini masih belum pulih kembali seperti semula sehingga menyebabkan turunnya peranan sektor jasa-jasa lainnya. Sedangkan pada sektor listrik, gas, air bersih merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PDRB Propinsi DIY yaitu kurang dari 1% selama periode penelitian .

Secara keseluruhan pada tahun 2000, hanya pada sektor pertanian, sektor listrik, gas, air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor pengangkutan, komunikasi saja yang mengalami kenaikan dalam memberikan

kontribusinya pada total PDRB bila dibandingkan dari tahun 1999. Sedangkan empat sektor lainnya yaitu sektor industri pengolahan, sektor keuangan, sewa: jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya peranannya terhadap total PDRB menurun dibanding dari tahun 1999. Melihat perkembangan ini seharusnya pemerintah daerah Propinsi DIY lebih cermat lagi dalam menentukan perencanaan pembangunan dan melaksanakan rencana pembangunan tersebut agar peranan seluruh sektor ekonomi yang ada terhadap total PDRB dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang.

Spesialisasi suatu daerah akan tumbuh sebesar daerah tersebut dalam mengeksploitasi *comparatif advantage* daerah yang bersangkutan atau mengambil keunggulan skala ekonomi dalam produksi atau keduanya. Model Hickscher-Ohlin memprediksikan bahwa spesialisasi regional akan meningkat sesuai dengan daerah tersebut dalam memproduksi dan mengekspor produksinya secara intensif, sedangkan menurut model *increasing returns* memprediksikan bahwa spesialisasi regional akan meningkat jika perekonomian eksternal *signifikan* atau jika skala ekonomi produksi konvensional menyatakan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan besar yang dapat memenuhi *total demand* (Krugman, 1991).

Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan jumlah PDRB pada masing-masing Kabupaten dan Kotamadya yang ada di Propinsi DIY menurut harga konstan 1993 pada tahun 1994 hingga tahun 2000.

Tabel 1.2  
 PDRB Kabupaten dan Kotamadya Yang Ada di Propinsi DIY  
 menurut Harga Konstan 1993 Tahun 1994 – 2000  
 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB					
	Kabupaten Sleman	Kotamadya Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo	Propinsi DIY
1994	1234722	1162564	757530	725912	505786	4357906
1995	1335484	1278241	812373	782516	532712	4741903
1996	1445704	1394766	866488	838463	565476	5111563
1997	1496861	1461003	893254	871542	567408	5286367
1998	1378089	1295697	809011	808809	428480	4689943
1999	1404658	1309435	820611	905619	347061	4824445
2000	1451772	1356541	845718	930497	355040	5017710

Sumber : BPS Propinsi Yogyakarta dalam angka berbagai edisi, data diolah

Dari tabel 1.2 diatas dapat kita ketahui bahwa total PDRB Kabupaten Sleman merupakan PDRB yang terbesar diantara keempat kabupaten yang lainnya, dari awal tahun penelitian sampai akhir tahun penelitian, PDRB Kabupaten Sleman selalu memberikan kontribusi yang terbesar bagi total PDRB Propinsi DIY yaitu rata-rata sebesar 28,65%, kemudian diikuti Kotamadya Yogyakarta sebesar 27,19%, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 17,23%, Kabupaten bantul sebesar 17,07% dan yang terakhir Kabupaten Kulon Progo sebesar 9,66%. Jika dilihat dari perkembangan PDRB dari masing-masing Kabupaten dan Kotamadya menunjukkan perkembangan PDRB yang menaik dari tahun 1994 hingga tahun 1997, akan tetapi pada tahun 1998 yang seperti kita ketahui dimana terjadi krisis ekonomi menyebabkan PDRB pada semua Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY mengalami penurunan. Pada tahun 1999 PDRB dari masing-masing Kabupaten dan Kotamadya tersebut mulai kembali naik dan pada tahun 2000 kembali lagi mengalami kenaikan, kecuali pada Kabupaten Kulon Progo yang sejak tahun 1998 hingga tahun 2000 jumlah total

PDRB-nya menurun, namun secara keseluruhan total PDRB Propinsi DIY pada tahun 1999 dan tahun 2000 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, hasil dari pembangunan selama ini tidak memperkecil jurang kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia, mengharuskan kita untuk meninjau ulang orientasi pembangunan yang telah ditempuh selama ini. Walaupun masalah strategi pembangunan bukanlah masalah sederhana, namun fenomena pengangguran yang semakin banyak, bersamaan dengan persoalan semakin melebarnya jurang kaya-miskin, serta jurang antar sektor ekonomi membuat kita harus mencari strategi alternatif yang lebih berorientasi pada pemerataan dari pada pertumbuhan, dan lebih berpihak pada penciptaan peluang kerja daripada peningkatan output (Revrison Baswir, 1997:28).

Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan perencanaan pembangunan, salah satunya melalui identifikasi sektor-sektor ekonomi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipertahankan bahkan jika mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga penggunaan segenap potensi ekonomi yang ada dapat semakin efisien dan efektif untuk menjadi modal dasar agar Kabupaten dan Kotamadya yang ada di Propinsi DIY dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya dalam rangka mensukseskan pembangunan di Indonesia dan menghadapi era globalisasi sekarang ini.

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ SPESIALISASI REGIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 1994 – 2000 ”



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi di Propinsi DIY yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan struktur perekonomian yang terjadi pada Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi DIY periode tahun 1994 – 2000.
2. Sektor mana saja yang berpotensi untuk dikembangkan yang merupakan andalan dalam struktur perekonomian pada masing-masing Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY pada periode tahun 1994 – 2000.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dikemukakan diatas pada dasarnya penulis bertujuan untuk mengetahui:

- 1 Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY periode tahun 1994 – 2000.
- 2 Untuk mengidentifikasi dan menentukan sektor yang merupakan andalan dalam struktur perekonomian masing-masing Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY pada periode tahun 1994 – 2000.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1 Sebagai tambahan masukan bagi Pemerintah Daerah tingkat satu (Dati I) atau Propinsi dan bagi Pemerintah Daerah tingkat dua (Dati II) atau Kabupaten dan Kotamadya dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan agar dalam pelaksanaan dari rencana pembangunan

perekonomian di masing-masing Kabupaten dan Kotamadya khususnya dan Propinsi DIY pada umumnya dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang.

2. Bagi penulis, dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan.
3. Diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan dan informasi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Data dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, laporan instansi yang terkait, dan studi kepustakaan yaitu:

1. BPS dalam berbagai tahun terbitan.
2. Statistik Indonesia dalam angka, berbagai tahun terbitan.
3. Propinsi DIY dalam angka, berbagai tahun terbitan.
4. Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi DIY dalam angka, berbagai tahun terbitan.

### **1.5.2. Metode pengumpulan data**

Metode penelitian dan pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan angka-angka dan data sekunder dari berbagai bentuk laporan dan studi kepustakaan.

### 1.5.3. Alat Analisis

Alat analisis yang dipergunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini dengan metode *Location Quotient (LQ)* dan metode *Shift Share (SS)*.

#### 1.5.3.1. Metode *Location Quotient (LQ)*

Teknik analisis *Location Quotient (LQ)* merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial dalam perekonomian suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor yang sejenis dalam perekonomian secara nasional. biasanya satuan unit ukuran yang digunakan adalah tingkat kesempatan kerja (Bendavid-Val,1991:74) namun unit ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat PDRB.

Secara singkat koefisien LQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Bendavid-Val,1991:75) :

$$\frac{\frac{X_r}{R_{Vr}}}{\frac{X_n}{R_{Vn}}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } R_{Vr}}{X_n \text{ sebagai bagian dari } R_{Vn}} \quad \text{Atau} \quad \frac{\frac{X_r}{R_{Vr}}}{\frac{X_n}{R_{Vn}}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } X_n}{R_{Vr} \text{ sebagai bagian dari } R_{Vn}}$$

Dimana :

$X_r$  : kontribusi sektor X pada PDRB di tingkat Kabupaten, Kotamadya.

$X_n$  : kontribusi sektor X pada PDRB di Propinsi DIY.

$R_{Vr}$  : PDRB Kabupaten, Kotamadya.

$R_{Vn}$  : PDRB Propinsi DIY.

Dalam penelitian ini analisis basis ekonomi menggunakan angka indeks LQ untuk melakukan pendekatan sektoral yaitu dengan

mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan.

Menurut Richardson (1991) asumsi dasar metode LQ ini adalah :

1. Pola permintaan di setiap daerah adalah sama dengan pola permintaan secara nasional.
2. Produktifitas tiap pekerja pada sektor regional adalah sama dengan produktifitas dalam industri nasional.
3. Perekonomian nasional merupakan perekonomian tertutup.

Walaupun asumsi diatas ada kelemahannya, tetapi metode ini paling tidak memiliki dua keunggulan untuk dapat menghasilkan taksiran terhadap keunggulan ekonomi:

1. Konsep analisis metode LQ ini untuk mengklarifikasikan sektor unggulan atau derajat *self-sufficiency* suatu sektor pada daerah tertentu dibandingkan dengan wilayah regional.
2. Metode ini relatif murah dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui tren.

Setelah LQ dihitung maka akan di dapatkan kesimpulan :

1. Bila nilai LQ suatu sektor lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) maka sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dari pada sektor yang sama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, jadi sektor yang bersangkutan merupakan sektor unggulan.
2. Bila nilai LQ suatu sektor lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ) maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dari pada sektor yang sama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

3. Bila nilai LQ suatu sektor sama dengan satu ( $LQ = 1$ ) maka sektor yang bersangkutan tingkat spesialisasinya sama dengan sektor yang sama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

#### 1.5.3.2. Metode *Shift Share* (SS)

##### **Analisis *shift share* Klasik**

Analisis *shift share* adalah suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana peran-peran sektor dalam perekonomian daerah dengan cara membandingkan kinerja dari sektor ekonomi suatu wilayah dengan kinerja dan sektor ekonomi nasional (wilayah yang lebih luas di atasnya). Dengan demikian dapat ditunjukkan adanya *shift* (pergeseran). Dimensi dari keterkaitan ekonomi yang ada menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya.

Bentuk dan sistem keterkaitan tersebut ada dua macam :

1. Hubungan antar daerah yang satu dengan yang lainnya ataupun hubungan antar sektor yang satu dengan yang lainnya dan hubungan ini disebut hubungan *shift*.
2. Hubungan antara daerah yang lebih rendah tingkat administrasinya dengan daerah yang lebih tinggi tingkat administrasinya disebut hubungan *share*.

Teknik analisis *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti nilai pertumbuhan dan pendapatan / output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasionalnya (N) *industri mix* (M) atau bauran

industri dan keunggulan kompetitif (C) (Bendavid-Val,1983, Hoover,1984). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pangsa (*share*), pengaruh *industri mix* disebut *proportional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share*. Itulah sebabnya disebut teknik *shift-share* (Supono,1993:44).

Untuk sektor industri atau sektor *i* di wilayah *j*. (Bendavid-Val,1983, Hoover,1984) maka :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Bila analisis ini diterapkan pada nilai tambah / output pendapatan = E maka:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

$$D_{ij} = E^*_{ij} \cdot E_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} - r_n \quad (3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_m - r_n) \quad (4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n) \quad (5)$$

Dimana  $r_{ij}$ ,  $r_m$ , dan  $r_n$  mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij} \quad (6)$$

$$r_m = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in} \quad (7)$$

$$r_n = (E^*_{n} - E_n)/E_n \quad (8)$$

dimana:  $E_{ij}$  = PDRB sektor *i* di wilayah *j*

$E_n$  = pertumbuhan ekonomi nasional

(\*) = menunjukkan produksi (output) perekonomian pada tahun akhir yang diteliti.

Pengaruh bauran industri untuk sektor *i* akan positif di semua wilayah ( $r_m > r_n$ ) demikian pula akan menjadi sama dengan nol bila ( $r_m$

=  $r_n$ ) atau negatif bila ( $r_{in} < r_n$ ). Selanjutnya keunggulan kompetitif untuk sektor  $i$  di wilayah  $j$  dapat positif, nol, atau negatif tergantung dari apakah pertumbuhan regional di setiap sektor tersebut lebih cepat ( $r_{ij} > r_{in}$ ), sama dengan nol ( $r_{ij} = r_{in}$ ), atau lebih lambat ( $r_{ij} < r_{in}$ ) daripada pertumbuhan di sektor yang bersangkutan pada tingkat nasional. selain itu keunggulan kompetitif yang positif (negatif) mempunyai implikasi bahwa *share* suatu wilayah suatu sektor dalam tahunan naik (turun) selama periode waktu penelitian.

#### **Analisis *shift share* Esteban-Marquillas (E-M)**

Esteban-Marquillas (1974) melakukan modifikasi terhadap teknik *shift share* klasik meliputi pendefinisian kembali keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari teknik *shift share* dan menciptakan komponen keempat *shift share* yaitu pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ). Untuk sektor  $i$  di wilayah  $j$  pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ) (seperti yang dikutip Hermanto, 57) dirumuskan sebagai berikut:

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_n) \quad (10)$$

Persamaan *shift share* yang direvisi itu mengandung unsur baru yaitu *homothetic employment* yang diberi notasi  $E'_{ij}$  dan dirumuskan sebagai berikut:

$$E'_{ij} = E_{ij} (E_{in}/E_n) \quad (11)$$

Dengan mengganti PDRB ( $E_{ij}$ ) dengan *homothetic employment* ( $E'_{ij}$ ) maka persamaan (5) berubah menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_n) \quad (12)$$

Secara ringkas hasil modifikasi Esteban-Marquillas terhadap analisis *shift share* (Supono 1993:47) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} + A_{ij} \quad \text{atau}$$

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} \cdot (r_m - r_n) + E'_{ij} \cdot (r_j - r_m) + (E_{ij} - E'_{ij}) \cdot (r_n - r_m) \quad (13)$$

Persamaan (13) menunjukkan bahwa jika suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Kemungkinan-kemungkinan pengaruh alokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3  
Pengaruh Alokasi dari Analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas

No	Pengaruh alokasi $A_{ij}$	Komponen		Definisi
		$(E_{ij} - E'_{ij})$	$(r_j - r_m)$	
1	-	+	-	Tak ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi
2	+	-	-	Tak ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
3	-	-	+	Ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
4	+	+	+	Ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi

Sumber : Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 1 No 1/2000

#### Analisis *shift share* Arcelus

Modifikasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Arcelus (1984) adalah memasukkan sebuah komponen yang merupakan dampak pertumbuhan intern suatu wilayah. Modifikasi ini mengganti  $C_{ij}$  dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan sebuah komponen bauran industri regional sebagai sisanya.

Arcelus menekankan komponen kedua yang mencerminkan adanya *agglomeration economic* (penghematan biaya persatuan karena kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha).



Pengaruh pertumbuhan wilayah ( $R_{ij}$ ) (seperti yang dikutip Hermanto, 58) dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{ij} = E'_{ij} - (r_j - r_n) + ((E_{ij} - E'_{ij}) \cdot (r_j - r_n)) \quad (14)$$

Dimana  $E'_{ij}$  = *homothetic employment* sektor i di wilayah j

$E_{ij}$  = *employment* di sektor i di wilayah j

$r_j$  = laju pertumbuhan wilayah j

$r_n$  = laju pertumbuhan nasional

Komponen bauran industri regional ( $RI_{ij}$ ) menurut Arcelus (seperti yang dikutip Hermanto, JESP 2000:58) dirumuskan sebagai berikut:

$$RI_{ij} = (E'_{ij} \{ (r_j - r_n) - (r_n - r_n) \} + (E_{ij} - E'_{ij}) \{ (r_j - r_n) - (r_n - r_n) \}) \quad (15)$$

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian Spesialisasi Regional Propinsi DIY ini dibagi menjadi :

- BAB I** Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, alat analisis data, serta sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan teori, yang mengungkapkan penelitian empiris sebelumnya, teori perubahan struktur ekonomi, teori pembangunan daerah, teori perencanaan, dan teori alat analisis.
- BAB III** Gambaran umum Propinsi DIY menjelaskan tentang keadaan geografi, keadaan kependudukan, keadaan perekonomian setiap sektornya, keadaan sosial, agama, dan pariwisata.
- BAB IV** Analisa data dan Pembahasan, berisikan hasil dan pembahasan penelitian.
- BAB V** Penutup, berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Telaah pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah penentuan sektor unggulan bagi suatu perekonomian daerah. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Heriyanto pada tahun 1999 mengenai "Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Propinsi Jambi" penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jambi tahun 1988 hingga tahun 1997 dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) yang dan *Shift Share* (SS) Klasik. Dari hasil uji LQ diketahui bahwa sektor yang potensial dikembangkan pada Propinsi Jambi adalah sektor pertanian dan pertambangan, sedangkan hasil uji SS sektor yang memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, bangunan, dan pengangkutan dan komunikasi.

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak menunjukkan perubahan struktur perekonomian Propinsi Jambi, secara umum perekonomian Propinsi Jambi bertumpu pada sektor pertanian kontribusi kelompok sektor tersier (sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perbankan) cenderung mengalami penurunan sedangkan kontribusi pada sektor sekunder (industri pengolahan, listrik air dan gas, bangunan) cenderung mengalami kenaikan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hermanto pada tahun 2000 yang menganalisis tentang "Analisis Spesialisasi Propinsi Kalimantan Tengah". Penelitian

ini menggunakan alat analisis LQ, analisis SS Klasik, analisis SS Esteban-Marquillas dan analisis SS Arcelus, periode penelitian yang diteliti dari tahun 1990 hingga 1995 dengan menggunakan data PDRB Propinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil analisis LQ dapat diketahui sektor yang memiliki spesialisasi pada Propinsi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan transportasi, pada analisis SS Klasik diketahui ada empat sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif yang positif yaitu pada sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa lainnya, sedangkan dari analisis SS Esteban-Marquillas diketahui dari kesembilan sektor ekonomi yang ada hanya tiga sektor ekonomi yang sama sekali tidak mempunyai spesialisasi dan keunggulan kompetitif yaitu pada sektor industri pengolahan, bangunan, dan keuangan. Hasil analisis SS Arcelus menunjukkan keterkaitan antar sektor di Propinsi Kalimantan Tengah cukup kuat, terutama pada empat sektor yang memiliki pengaruh bauran industri regional yang positif yaitu sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan jasa-jasa lainnya

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas adalah dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan perekonomian yaitu perekonomian pada tingkat Dati II, dalam penelitian ini adalah perekonomian pada setiap Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo, agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada setiap masing-masing daerahnya sehingga pertumbuhan pada masing-masing DATI II Propinsi DIY dapat lebih ditingkatkan

melalui potensi dari sektor-sektor yang menjadi unggulannya. sehingga secara tidak langsung pertumbuhan perekonomian yang terjadi pada wilayah Kabupaten dan Kotamadya tersebut akan menaikkan pertumbuhan perekonomian Propinsi dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional.

## 2.2. Konsep dan Teori Pembangunan Ekonomi

### 2.2.1. Definisi dan Pengertian Pembangunan Ekonomi

Definisi lama pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami kenaikan dalam jangka panjang (Baldwin,1957:2-3), sedangkan menurut definisi baru, pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi pemberantasan dan pengurangan kemiskinan yang absolut (jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok) (Todaro,1977:87).

### 2.2.2. Definisi dan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dalam ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono,1982:2) Perlu dijelaskan dalam pengertian ini bahwa ada perbedaan yang jelas antara pengertian pertumbuhan dengan perkembangan atau pembangunan ekonomi

karena masing-masing pengertian mengandung makna dan implikasi yang berbeda, bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa (output).

Seperti yang dikutip oleh Dr Suryana (4-5) di dalam **pembangunan ekonomi** terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP di mana kenaikannya disertai oleh perbaikan dan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*), sedangkan **pertumbuhan ekonomi** diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak.

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami suatu pertumbuhan atau berkembang, apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya.

### 2.3. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Teori perubahan struktur memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara berkembang mentransformasikan struktur perekonomian negara pertanian subsisten yang tradisional ke perekonomian yang lebih modern yang lebih mengarah ke bidang industri manufaktur dan jasa. Menurut Syahrir (1995:52-53) perubahan struktur ekonomi tersebut mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perubahan ekonomi meningkatkan pertumbuhan penduduk.
2. *Share* sektor primer berkurang.

3. *Share* sektor sekunder meningkat.
4. *Share* sektor jasa-jasa lebih lebih konstan hingga sebuah negara menjadi negara maju.
5. Konsumsi akan bahan makanan menurun implikasinya adalah produksi pangan sektor primer menurun sedangkan sektor industri dan investasi naik.

Dalam jangka panjang, suatu pembangunan ekonomi biasanya diikuti oleh suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Seperti yang dikutip Imamudin (JESP) banyak negara berkembang (LDCs) dalam 30 tahun belakangan ini telah mengalami suatu transisi ekonomi, walaupun dalam prosesnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung dari kondisi awal ekonomi masing-masing. Pada awal pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an, negara-negara tersebut termasuk Indonesia, masih didominasi oleh sektor-sektor primer yakni pertanian dan pertambangan, akan tetapi setelah melalui proses pembangunan dan modernisasi ekonomi yang cukup lama, sektor-sektor sekunder seperti industri manufaktur dan bangunan, dan sektor tersier (jasa) termasuk keuangan, menjadi lebih penting dari pada sektor-sektor primer.

Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat adanya perubahan, pertama dari sejumlah faktor yang berasal dari sisi permintaan agregat yaitu adanya peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang menyebabkan adanya perubahan dalam hal komposisi maupun selera barang yang dikonsumsi sehingga akan memperbesar pasar bagi barang-barang baru (non makanan), juga akan meningkatkan diversifikasi pasar dan pada akhirnya akan merangsang munculnya industri-industri baru. Faktor perubahan struktur ekonomi yang kedua berasal dari sisi penawaran agregat yaitu adanya perubahan teknologi dan penemuan-penemuan sumber daya baru untuk

melakukan proses produksi, relokasi dana investasi dan *resources* utama lainnya, termasuk teknologi dan tenaga kerja dari satu sektor yang kurang produktif ke sektor lainnya yang produktif juga akan mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi.

### 2.3.1. W. Arthur Lewis

Menurut model pembangunan Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor yaitu, pertama sektor tradisional (pedesaan subsisten) yang ditandai oleh adanya surplus penduduk dan produktifitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Yang kedua adalah sektor modern (industri perkotaan) yang ditandai dengan produktifitas tenaga kerja tinggi. Perhatian utama dari teori ini adalah pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern yang disebabkan adanya peningkatan investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi tersebut dikarenakan adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah sektor tradisional.

Kritik dari teori Lewis ini diantaranya adalah model Lewis ini mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern pasti sebanding dengan akumulasi modal sektor modern, adanya dugaan tentang pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern akan menjamin keberadaan upah riil di sektor modern konstan sampai pada suatu titik dimana surplus penawaran tenaga kerja habis terpakai.

### 2.3.2. H. Chenery

Pola pembangunan dari Hollis Chenery membahas mengenai perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi. Hasil studi Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita perekonomian suatu negara akan bergeser dari perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian yang tradisional beralih ke sektor industri yang modern. Penurunan permintaan bahan pangan akan dikompensasikan oleh peningkatan terhadap barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah yang mendorong peningkatan dalam struktur *Gross National Product* (GNP).

Dari aspek tenaga kerja terjadi perpindahan dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di kota, sekalipun transformasi tenaga kerja itu masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan struktural itu sendiri. Dampak negatif dari transformasi struktural adalah menimbulkan arus urbanisasi seiring dengan laju pertumbuhan di sektor industri. Urbanisasi ini akan semakin memperberat keadaan di kota sehingga akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kriminalitas, pemukiman kumuh dan sebagainya pada akhirnya akan memperburuk pemerataan distribusi pendapatan. Hipotesis utama dari teori pembangunan Chenery adalah bahwa model perubahan struktural yang terjadi pada tiap-tiap negara, sebenarnya dapat diidentifikasi. Proses perubahan secara umum dari masing-masing negara pada dasarnya memiliki kesamaan pola, teori ini juga mentoleransi kemungkinan adanya variasi dalam proses pembangunan antar negara karena adanya perbedaan *factor endowment*,



kebijakan pemerintah, aksesibilitas terhadap modal dan teknologi merupakan determinan yang mempengaruhi transformasi struktural suatu negara. (lihat Tulus Tambunan, 2001:62)

## 2.4. Konsep Daerah

Menurut Richardson H.W dalam bukunya yang berjudul *Element of Regional Economic* mengatakan bahwa konsep tentang daerah dapat dibedakan menjadi dua macam daerah yang berbeda (yaitu daerah homogen dan daerah berkutub):

### 1. Konsep Daerah Homogen (*Homogenius Region*)

Konsep daerah ini memandang daerah sebagai suatu wilayah tata ruang atau suatu daerah geografi yang dapat dikaitkan menjadi daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri ini bisa bersifat ekonomi misalnya struktur produksinya serupa dengan atau pola konsumen homogen, bersifat geografi misalnya topografi atau iklimnya serupa, bahkan bisa pula bersifat sosial atau politik misalnya suatu kepribadian regional atau kesetiaan yang bersifat tradisional pada suatu partai tertentu.

### 2. Konsep Daerah Berkutub (*Plurarized Region*)

Konsep daerah ini memandang daerah dari sisi satuan-satuannya heterogen misalnya distribusi penduduk yang mengakibatkan terjadinya kota-kota besar, kotamadya, desa-desa. Dengan kata lain hirarki pemukiman tetapi satu sama lain erat dan saling berhubungan secara fungsional. Sifat khas dari konsep ini adalah terletak pada kaitan antara pusat dan daerah dalam hal ini setiap pusat atau sentral diasumsikan memiliki daerah terbelakang (*hinterland*).

Sedangkan menurut UU no 5 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pengertian daerah sebagai daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU no 5 tahun 1974 tersebut disebutkan ada dua daerah otonom yaitu Dati I dan Dati II, dengan demikian daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

## 2.5. Teori Pembangunan Daerah

### 2.5.1. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Strategi pembangunan yang berdasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Kelemahan dari model teori ini adalah bahwa didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global, namun demikian teori ini sangat berguna

untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

### 2.5.2. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

Teori pembangunan yang ada sekarang ini seperti yang dikemukakan diatas tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dan komprehensif. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui perbedaan antara konsep lama dan konsep baru teori pembangunan dapat dilihat pada tabel tabel 2.1 dibawah ini (Lincoln Arsyad, 1997:278) :

Tabel 2.1  
Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan artinya semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga

## 2.6. Teori Perencanaan Pembangunan

### 2.6.1. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan pembangunan adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian negara dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan

Perencanaan pembangunan bisa bersifat komprehensif (multi sektoral), bisa juga bersifat parsial (lokal). Perencanaan yang bersifat komprehensif targetnya semua aspek penting yang mencakup perekonomian nasional, sedangkan perencanaan yang bersifat parsial targetnya meliputi sebagian dari sektor ekonomi nasional, seperti sektor pertanian, perindustrian, sektor pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya.

#### **2.6.2. Unsur-Unsur Pokok Dalam Perencanaan**

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut (Lincoln Arsyad, 1997: 105) :

1. Kebijakan dasar, unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka rencana secara makro, dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi dari hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga dan kebijaksanaan sektoral lainnya.

5. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral, yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama dengan penyusunan rencana sasaran-sasaran.

### 2.6.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahannya kegiatan, adanya pedoman pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan perkiraan-perkiraan mengenai prospek, potensi, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

## 2.7. Model Perencanaan di Negara Sedang Berkembang

Di negara sedang berkembang termasuk Indonesia terdapat beberapa model perencanaan pembangunan (Soekartawi, 1990):

### 1. Perencanaan Regional

Perencanaan ini dimaksudkan agar semua daerah dapat melakukan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan perencanaan yang

ada di daerah tersebut. Bila perencanaan regional berkembang dengan baik maka diharapkan kemandirian daerah dapat dimantapkan sehingga daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada pusat.

## 2. Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral sering diistilahkan dengan perencanaan departemen misalnya perencanaan bidang pertanian. Perencanaan ini sifatnya lebih spesifik disesuaikan dengan masing-masing sektor.

## 3. Perencanaan Proyek

Perencanaan ini di Indonesia disebut perencanaan APBN / APBD karena dilaksanakan dalam waktu sekitar 1 tahun dan umumnya pembiayaan diambil dari dana rutin tahunan yang tertuang dalam APBN / APBD.

## 4. Perencanaan Terpadu

Perencanaan ini diistilahkan sebagai perencanaan komprehensif (*integrated planing*). Maksud dari perencanaan ini adalah untuk menghindari perencanaan yang saling berbenturan satu dengan lain. Contoh dari perencanaan ini adalah rapat koordinasi pembangunan (Rakobang).

Perencanaan daerah yang dilakukan dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan terlepas dari arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional, dengan kerja sama dan keterpaduan yang kuat antar daerah dan pusat dapat memperkecil terjadinya kesenjangan antar daerah, keadaan tersebut akan tercapai apabila pemerintah ikut campur tangan terutama dalam mendistribusikan investasi, sehingga perkembangan antar daerah dapat beriringan. Perbedaan perkembangan

antar daerah terutama disebabkan oleh kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, kebijakan yang dipilih daerah tersebut untuk memacu pembangunan, serta adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu yang menjadi perhatian daerah sehingga hal ini yang menyebabkan ketimpangan antar daerah yang tidak dapat dihindari.

## 2.9. Konsep dan Teori Alat Analisis

Sesuai dengan masalah yang diteliti maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa pembangunan yaitu teknik analisa *Location quotient* dan teknik analisa *shift share*

### 1.9.1 Metode *Location Quotient* (LQ)

Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial dalam perekonomian suatu wilayah yaitu dengan membandingkan peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor yang sejenis dalam perekonomian secara nasional atau tingkat pemerintahan yang ada di atasnya, biasanya satuan unit ukuran yang digunakan adalah tingkat kesempatan kerja (Bendavid-Val, 1991:74) namun unit ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat PDRB.

Secara singkat koefisien LQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Bendavid-Val 1991:75) :

$$\frac{\frac{X_r}{RV_r}}{\frac{X_n}{RV_n}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } RV_r}{X_n \text{ sebagai bagian dari } RV_n} \text{ Atau } \frac{\frac{X_r}{X_n}}{\frac{RV_r}{RV_n}} = \frac{X_r \text{ sebagai bagian dari } X_n}{RV_r \text{ sebagai bagian dari } RV_n}$$

Dimana :

$X_r$  : kontribusi sektor X pada PDRB di tingkat Kabupaten, Kotamadya.

$X_n$  : kontribusi sektor X pada PDRB di Propinsi DIY.

$RV_r$  : PDRB Kabupaten, Kotamadya.

$RV_n$  : PDRB Propinsi DIY.

Dalam penelitian ini analisis basis ekonomi menggunakan angka indeks LQ untuk melakukan pendekatan sektoral yaitu dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan.

Menurut Richardson (1991) asumsi dasar metode LQ ini adalah :

1. Pola permintaan di setiap daerah adalah sama dengan pola permintaan secara nasional.
2. Produktifitas tiap pekerja pada sektor regional adalah sama dengan produktifitas dalam industri nasional.
3. Perekonomian nasional merupakan perekonomian tertutup.

Walaupun asumsi diatas ada kelemahannya, tetapi metode ini paling tidak memiliki dua keunggulan untuk dapat menghasilkan taksiran terhadap keunggulan ekonomi:

1. Konsep analisis metode LQ ini untuk mengklarifikasikan sektor unggulan atau derajat *self-sufficiency* suatu sektor pada daerah tertentu dibandingkan dengan wilayah regional.
2. Metode ini relatif murah dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui tren.

Setelah LQ dihitung maka akan di dapatkan kesimpulan :

1. Bila nilai LQ suatu sektor lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) maka sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dari pada sektor yang sama di



tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. jadi sektor yang bersangkutan merupakan sektor unggulan (dalam penelitian ini merupakan sektor unggulan Kabupaten dan Kotamadya yang ada di Propinsi DIY).

2. Bila nilai LQ suatu sektor lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ) maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dari pada sektor yang sama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi sektor yang bersangkutan bukan merupakan sektor unggulan.
3. Bila nilai LQ suatu sektor sama dengan satu ( $LQ = 1$ ) maka sektor yang bersangkutan tingkat spesialisasinya sama dengan sektor yang sama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

## 2.9.2. Metode *Shift Share* ( SS )

### 2.9.2.1. Analisis *shift share* klasik

Analisis *shift share* adalah suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana peran-peran sektor dalam perekonomian, dengan cara membandingkan kinerja dan sektor ekonomi suatu wilayah dengan kinerja dan sektor ekonomi nasional (wilayah yang lebih luas di atasnya). Dengan demikian dapat ditunjukkan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan daerah jika daerah tersebut memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Jika penyimpangan itu positif hal itu disebut keunggulan positif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Bentuk dan sistem keterkaitan tersebut ada dua macam :

1. Hubungan antar daerah yang satu dengan yang lainnya ataupun hubungan antar sektor yang satu dengan yang lainnya dan hubungan ini disebut hubungan *shift*.
2. Hubungan antara daerah yang lebih rendah tingkat administrasinya dengan daerah yang lebih tinggi tingkat administrasinya disebut hubungan *share*.

Teknik analisis *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai pertumbuhan dan pendapatan / output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasionalnya (N) *industri mix* (M) dan keunggulan kompetitif (C) (Bendavid-Val,1983. Hoover,1984).

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pangsa (*share*), pengaruh *industri mix* disebut *proportional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share*. Itulah sebabnya disebut teknik *shift-share* (Supono 1993:44).

Untuk sektor industri atau sektor i di wilayah j, (Bendavid-Val, 1983. Hoover,1984) maka :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Bila analisis ini diterapkan pada output pendapatan = E maka:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

$$D_{ij} = E \cdot i_j \cdot E_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} - r_n \quad (3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_m - r_n) \quad (4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_i - r_n) \quad (5)$$

Dimana  $r_{ij}$ ,  $r_{in}$ , dan  $r_n$  mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij} \quad (6)$$

$$r_{in} = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in} \quad (7)$$

$$r_n = (E^*_n - E_n)/E_n \quad (8)$$

dimana:  $E_{ij}$  = PDRB sektor  $i$  di wilayah  $j$

$E_n$  = pertumbuhan ekonomi nasional

(\*) = menunjukkan produksi (output) perekonomian pada tahun akhir yang diteliti.

Pengaruh bauran industri untuk sektor  $i$  akan positif di semua wilayah ( $r_{in} > r_n$ ) demikian pula akan menjadi sama dengan nol bila ( $r_{in} = r_n$ ) atau negatif bila ( $r_{in} < r_n$ ). Selanjutnya keunggulan kompetitif untuk sektor  $i$  di wilayah  $j$  dapat positif, nol, atau negatif tergantung dari apakah pertumbuhan regional di setiap sektor tersebut lebih cepat ( $r_{ij} > r_{in}$ ), sama dengan nol ( $r_{ij} = r_{in}$ ), atau lebih lambat ( $r_{ij} < r_{in}$ ) daripada pertumbuhan di sektor yang bersangkutan pada tingkat nasional.

#### 2.9.2.2. Analisis *shift share* Esteban-Marquillas

Esteban – Marquillas (1974) melakukan modifikasi terhadap teknik *shift share* klasik meliputi pendefinisian kembali keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari teknik *shift share* dan menciptakan komponen keempat *shift share* yaitu pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ). Untuk sektor  $i$  di wilayah  $j$  pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ) (seperti yang dikutip Hermanto, 57) dirumuskan sebagai berikut:

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) \cdot (r_n - r_{in}) \quad (10)$$

Persamaan *shift share* yang direvisi itu mengandung unsur baru yaitu *homothetic employment* yang diberi notasi  $E'_{ij}$  dan dirumuskan sebagai berikut:

$$E'_{ij} = E_{ij} \cdot (E_{in} / E_n) \quad (11)$$

Dengan mengganti PDRB ( $E_{ij}$ ) dengan *homothetic employment* ( $E'_{ij}$ ) maka persamaan (5) berubah menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} \cdot (r_{ij} - r_n) \quad (12)$$

Secara ringkas hasil modifikasi Esteban Marquillas terhadap analisis *shift share* (Soepono, 1993:47) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C'_{ij} + A_{ij} \quad \text{atau}$$

$$D_{ij} = E_{ij} - r_n + E_{ij}(r_{in} - r_n) + E'_{ij}(r_{ij} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_n) \quad (13)$$

Persamaan (13) menunjukkan bahwa jika suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Kemungkinan-kemungkinan pengaruh alokasi tersebut adalah :

Tabel 2.2  
Pengaruh Alokasi dari Analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas

	Pengaruh alokasi $A_{ij}$	Komponen		Definisi
		$(E_{ij} - E'_{ij})$	$(r_{ij} - r_n)$	
1	-	+	-	Tak ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi
2	+	-	-	Tak ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
3	-	-	+	Ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
4	+	+	+	Ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi

Sumber : Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 1 No 1/2000

### 2.9.2.3. Analisis *shift share* Arcelus

Modifikasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Arcelus (1984) adalah memasukkan sebuah komponen yang merupakan dampak pertumbuhan intern suatu wilayah atas perubahan (pertumbuhan ekonomi) wilayah. Modifikasi ini mengganti  $C_{ij}$  dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan sebuah komponen bauran industri regional sebagai sisanya.

Arcelus menekankan komponen kedua yang mencerminkan adanya *agglomeration economic* (penghematan biaya persatuan karena kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha).

Pengaruh pertumbuhan wilayah ( $R_{ij}$ ) (seperti yang dikutip Hermanto, 58 ) dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{ij} = E^*_{ij} \cdot (r_j - r_n) + (E_{ij} - E^*_{ij})(r_j - r_n) \quad (14)$$

Dimana  $E^*_{ij}$  = homothetic employment sektor i di wilayah j

$E_{ij}$  = employment di sektor i di wilayah j

$r_j$  = laju pertumbuhan wilayah j

$r_n$  = laju pertumbuhan nasional

Komponen bauran industri regional ( $RI_{ij}$ ) menurut Arcelus (seperti yang dikutip Hermanto, 2000, JESP:58) dirumuskan sebagai berikut.

$$RI_{ij} = E^*_{ij}\{(r_{ij} - r_j) - (r_n - r_n)\} + (E_{ij} - E^*_{ij})\{(r_j - r_j) - (r_n - r_n)\} \quad (15)$$

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1. Kondisi Geografis

##### 3.1.1. Letak Geografis

Propinsi DIY merupakan salah satu dari 26 propinsi yang ada di Indonesia. Secara geografis wilayah Propinsi DIY berada di pulau Jawa bagian tengah, posisi Propinsi DIY terletak antara  $110^{\circ}00'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur, dan  $7^{\circ}33'$  -  $8^{\circ}12'$  Lintang Selatan. Propinsi DIY memiliki luas wilayah sebesar  $3185,80 \text{ km}^2$  atau 0,17% dari luas wilayah Indonesia dan merupakan propinsi terkecil setelah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Daerah Propinsi DIY terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kotamadya dengan 75 Kecamatan dan 438 Kelurahan / Desa dengan perincian masing-masing Kabupaten dan Kotamadyanya sebagai berikut :

1. Kabupaten Kulon Progo.

Dengan luas wilayah  $586,27 \text{ km}^2$  (18,40% dari seluruh wilayah DIY) terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 Kelurahan / Desa.

2. Kabupaten Bantul.

Dengan luas wilayah  $506,85 \text{ km}^2$  (15,91% dari seluruh wilayah DIY) terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Kelurahan / Desa.

3. Kabupaten Gunung Kidul.

Dengan luas wilayah  $1485,36 \text{ km}^2$  (46,62% dari seluruh wilayah DIY) terdiri dari 15 Kecamatan dan 144 Kelurahan / Desa.

#### 4. Kabupaten Sleman .

Dengan luas wilayah 574,82 km<sup>2</sup> (18,04% dari seluruh wilayah DIY) terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Kelurahan / Desa.

#### 5. Kotamadya Yogyakarta.

Dengan luas wilayah 32,50 km<sup>2</sup> (1,02% dari seluruh wilayah DIY) terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa.

### 3.1.2. Batas Daerah

Daerah Propinsi DIY pada bagian selatan dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh beberapa wilayah di propinsi Jawa Tengah, untuk lebih lengkapnya batas antara Propinsi DIY dengan daerah-daerah lainnya terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1  
Batas wilayah Propinsi DIY

Bagian	Keterangan
Timur laut	Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.
Tenggara	Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.
Selatan	Lautan Indonesia
Barat	Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.
Barat laut	Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.

Sumber data : BPS, Yogyakarta dalam angka

### 3.1.3. Susunan Tanah dan Kondisi Alam

Berdasarkan satuan fisiografisnya Propinsi DIY terdiri dari :

1. Pegunungan Selatan, dengan luas ± 1656,25 km<sup>2</sup> dan dengan ketinggian 150-170 m.
2. Gunung Berapi Merapi, dengan luas ± 582,81 km<sup>2</sup> dan dengan ketinggian 80-2911 m.

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. dengan luas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$  dan dengan ketinggian 0-80 m.
4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran rendah Selatan, dengan luas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$  dan dengan ketinggian 0-572 m.

#### 3.1.4. Keadaan iklim

Keadaan iklim di Propinsi DIY yang sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan air laut, beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,2-440,1 mm yang di pengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Data selengkapnya mengenai keadaan iklim di Propinsi DIY menurut hasil dari catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto pada tahun 2000 diantaranya sebagai berikut :

##### 3.1.4.1. Curah hujan

Banyaknya hari hujan di Propinsi DIY terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari dan curah hujan sebanyak 291,2 mm atau rata-ratanya 9,4 mm, sedangkan curah hujan yang paling sedikit terjadi pada bulan September dengan jumlah hari hujan sebanyak 2 hari dan curah hujan 0,7 mm, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 20 hari dan curah hujan sebanyak 440,1 mm.

##### 3.1.4.2. Kecepatan angin

Kecepatan angin di Propinsi DIY yang terpantau pada tahun 2000 tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan kecepatan angin sebesar 340 knots dan terendah terjadi pada bulan Februari dengan kecepatan angin



sebesar 060, sedangkan jika dilihat dari rata-rata kecepatan angin perbulannya yang terbesar terjadi pada bulan Oktober dan November yakni masing-masing sebesar 270 knots dan rata-rata kecepatan angin terendah sebesar 90 knots yang terjadi pada bulan Februari.

#### 3.1.4.3. Kelembapan nisbi

Adapun mengenai kelembapan nisbi udara yang terjadi pada tahun 2000 rata-rata kelembapan nisbi terendah terjadi pada bulan Agustus dengan kelembapan sebesar 72% sedangkan rata-rata kelembapan nisbi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan kelembapan sebesar 89%.

#### 3.1.4.4. Temperatur udara

Sedangkan untuk temperatur udara di wilayah Propinsi DIY pada tahun 2000, suhu udara tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar  $35,0^{\circ}\text{C}$  dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli sebesar  $20,0^{\circ}\text{C}$ , secara keseluruhan rata-rata suhu udara di propinsi DIY pada tahun 2000 berkisar antara  $25,1^{\circ}\text{C}$  hingga  $27,3^{\circ}\text{C}$ .

Data selengkapnya keadaan curah hujan, kecepatan angin, kelembapan nisbi, dan temperatur udara yang terjadi di Propinsi DIY per bulannya dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2  
Keadaan Iklim Propinsi DIY Pada Tahun 2000

Bulan	Banyaknya hari hujan			Kecepatan angin			Kelembaban nisbi			Temperatur udara		
	Jumlah hari hujan	Banyak curah hujan (mm)	Rata-rata (mm)	Maks (knots)	Min (knots)	Rata-rata (knots)	Maks (%)	Min (%)	Rata-rata (%)	Maks (°C)	Min (°C)	Rata-rata (°C)
Januari	22	329,9	10,6	340	090	240	97	47	85	32,2	22,4	26,2
Februari	20	440,1	16,2	300	060	090	97	47	86	33,4	23,0	26,2
Maret	25	291,2	9,4	280	100	240	97	64	89	32,2	22,4	25,4
April	22	271,0	9,0	320	090	240	97	64	86	32,0	22,8	26,3
Mei	8	71,4	2,3	270	070	180	95	55	80	32,2	22,0	27,0
Juni	5	99,8	3,3	290	090	180	97	53	79	32,4	20,4	25,5
Juli	-	-	-	270	080	180	95	41	77	32,6	20,0	25,9
Agustus	3	10,4	0,3	300	170	240	94	31	72	34,2	22,4	25,1
September	2	7,0	0,2	280	120	200	95	42	75	35,0	23,2	27,3
Oktober	16	124,8	3,0	270	180	270	95	31	80	34,2	22,9	26,9
November	19	240,0	8,0	340	090	270	97	71	86	33,8	21,0	26,2
Desember	13	182,5	5,9	290	210	240	97	60	83	31,8	21,0	26,4

Sumber data : Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi DIY

### 3.2. Keadaan Kependudukan

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagai mana tertuang dalam GBHN. pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

#### 3.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk di Propinsi DIY tercatat sebanyak 3.121.701 jiwa yang terdiri dari 1.546.861 laki-laki dan 1.573.617 perempuan. jumlah ini masih terbagi lagi dengan penduduk yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia sebanyak 3.293.960 jiwa yang terdiri dari 1.6281.611 laki-laki dan 1.665.349 perempuan sedangkan penduduk yang mempunyai kewarganegaraan asing sebanyak 525 jiwa yang terdiri dari 642 laki-laki dan 1.167 perempuan.

Dengan luas wilayah sebesar 3.185,80 km<sup>2</sup> maka berdasarkan hasil penelitian BPS maka diperoleh kepadatan penduduk Propinsi DIY sebanyak 1.034,31 jiwa per km<sup>2</sup>, jumlah kepadatan penduduk ini setiap tahunnya mengalami kenaikan, kepadatan penduduk Propinsi DIY secara berurutan dari tahun 1997, 1998, 1999 masing-masing sebesar 1.008,69 jiwa per km<sup>2</sup>, 1.016,27 jiwa per km<sup>2</sup>, dan 1.024,84 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada Kotamadya Yogyakarta jumlah tingkat kepadatan penduduknya yang paling tinggi yaitu sebanyak 15.197,02 jiwa per km<sup>2</sup>, kemudian diurutan kedua Kabupaten Bantul sebanyak 1.525,42 jiwa per km<sup>2</sup>, urutan selanjutnya adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul yaitu masing-masing sebesar 1.468,42 jiwa per km<sup>2</sup>, 751,70 jiwa per km<sup>2</sup>, dan 500,41 jiwa per km<sup>2</sup>.

Komposisi penduduk di Propinsi DIY secara lebih rinci menurut kabupaten dan kotamadya pada tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini:

Tabel 3.3

Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY Tahun 2000

Kabupaten Kotamadya	Rumah Tangga	Penduduk			Seks rasio	Pertum- bahan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Kulon Progo	82.386	215.051	225.657	440.708	98.30	0.63
Bantul	185.882	378.288	394.870	773.158	95.80	0.80
Gunung Kidul	151.539	363.840	379.442	743.282	95.89	0.54
Sleman	204.914	417.002	427.074	844.076	97.64	1.26
Yogyakarta	98.147	254.955	238.948	493.903	106.70	1.39
Propinsi DIY	729.868	1.629.136	1.665.991	3.295.127	97.79	0.92

Sumber : Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun, BPS, Propinsi DIY

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kota-Desa, Luas wilayah, Kepadatan Penduduk, Kabupaten dan Kotamadya Propinsi DIY Tahun 2000

Kabupaten Kotamadya	Kota			Desa			Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (/km <sup>2</sup> )
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Kulon Progo	36.474	38.939	75.413	178.557	186.718	365.295	586.27	751.70
Bantul	266.914	277.066	543.980	11.374	117.804	229.178	506.85	1.525.42
Gunung Kidul	18.067	18.308	36.375	345.773	361.134	706.907	1.485.3	500.41
Sleman	131.513	337.225	668.738	85.489	89.849	175.338	574.82	1.468.42
Yogyakarta	254.955	238.948	493.903	-	-	-	32.50	15.197.02
Propinsi DIY	907.923	910.486	1.818.409	721.213	755.505	1.476.718	3.185.8	1.034.31

Sumber : Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun, BPS Propinsi DIY

### 3.2.2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi Bergeraknya roda pembangunan, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik, kondisi ketenagakerjaan di Propinsi DIY tahun 2000, diketahui penduduk yang termasuk angkatan kerja berjumlah sebanyak 1.724.775 orang atau sebesar 62,21%, sedangkan penduduk Propinsi DIY yang bukan merupakan

angkatan kerja sebanyak 970.893 atau sekitar 37,04% dari jumlah penduduk usia kerja orang untuk lebih jelasnya mengenai keadaan tenaga kerja di Propinsi DIY dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5  
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut  
Kegiatan Utama di Propinsi DIY Tahun 1999 dan 2000

Kegiatan Utama	1999		2000	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Angkatan Kerja</b>	1.624.079	63,22	1.724.775	62,21
Bekerja	1.547.630	60,24	1.663.503	61,71
Mencari Pekerjaan	76.449	2,98	61.27	1,25
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	945.097	36,79	970.893	37,04
Sekolah	555.484	21,62	496.715	18,52
Mengurus Rumah Tangga	286.534	11,15	344.739	13,71
Lainnya	103.079	4,01	129.439	4,81
Jumlah	2.569.176	100	2.695.668	100

Sumber : SUSENAS, BPS Propinsi DIY

Tabel 3.6  
Prosentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu  
Yang Laju menurut Lapangan Usaha Utama dan Kabupaten dan Kotamadya  
Propinsi DIY Tahun 1999 dan 2000

Sektor	Kulon progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
Pertanian	54,90	30,79	38,77	30,38	0,45
Pertambangan Pengolahan	0,63	1,06	0,51	0,38	0,11
Industri Pengolahan	10,68	19,94	7,60	13,51	12,25
Listrik, Gas Air bersih	0,00	0,15	0,14	0,00	0,11
Bangunan	4,75	8,54	3,89	7,55	1,81
Perdagangan, Hotel Restoran	13,91	21,40	25,76	22,75	46,15
Transportasi dan komunikasi	1,97	3,65	6,63	2,61	4,54
Keuangan, Persewaan, Jasa perbankan	0,50	0,67	1,07	1,60	1,81
Jasa-jasa	12,66	13,80	15,63	21,22	32,77
Total	100	100	100	100	100

Sumber : SUSENAS, BPS Propinsi DIY

Pada tabel 3.6 diatas dapat terlihat sebagian besar penduduk Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul bekerja pada sektor pertanian, bahkan pada Kabupaten Kulon progo lebih

dari 50 %. kemudian diurutkan kedua keempat Kabupaten tersebut penduduknya banyak bekerja pada sektor perdagangan hotel dan restoran .Lain halnya dengan penduduk Kotamadya Yogyakarta yang mayoritas bekerja pada sektor perdagangan: hotel: restoran yaitu sebesar 40,09% dimana kita ketahui di Kotamadya Yogyakarta terdapat banyak hotel, restoran dan juga merupakan pusat kota dari Propinsi DIY, sedangkan diurutkan kedua penduduknya banyak bekerja pada sektor jasa-jasa lainnya salah satunya banyak terdapatnya jasa pendidikan, jasa kesehatan di Kotamadya Yogyakarta sehingga menyebabkan banyak penduduknya yang bekerja pada sektor ini.

### 3.3. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari indikator PDRB daerah tersebut, PDRB Propinsi DIY menurut perkapita tiap tahunnya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat kecuali pada tahun 1998 PDRB perkapitanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sehingga PDRB perkapitanya turun, akan tetapi pada tahun 1999 PDRB perkapita Propinsi DIY menaik kembali walaupun kenaikannya hanya sedikit dari PDRB perkapita tahun 1998 yaitu hanya sekitar 4.175 juta sedangkan pada tahun 2000 PDRB perkapita Propinsi DIY kembali naik yaitu sebesar 1.607.364 juta atau naik 50.810 juta dari PDRB perkapita tahun 1999 yang hanya sebesar 1.556.554 juta.

Pada Tabel 3.7 berikut ini ditunjukkan perkembangan PDRB Propinsi DIY menurut harga berlaku, harga konstan dan perkapita pada tahun 1994 hingga tahun 2000.

Tabel 3.7  
PDRB Propinsi DIY menurut  
Harga Berlaku Harga Konstan Per Kapita Tahun 1994 – 2000  
(Juta Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	Per Kapita
1994	4.882.292	4.357.906	1.503.375
1995	5.618.645	4.741.903	1.625.415
1996	6.399.742	5.111.563	1.753.147
1997	7.233.677	5.286.367	1.760.336
1998	9.863.894	4.689.943	1.552.379
1999	11.702.985	4.824.445	1.556.554
2000	12.967.838	5.017.710	1.607.364

Sumber data : BPS, Propinsi DIY

Berikut ini penjelasan tentang keadaan perekonomian Propinsi DIY per sektornya :

### 3.3.1. Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual, sektor perkebunan, sektor kehutanan yang meliputi kegiatan penebangan, penanaman, pengolahan, pemeliharaan, sektor peternakan termasuk semua kegiatan pembibitan dan pembudidayaan segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong, dan diambil hasilnya.

Dari komoditas bahan makanan produksi padi Propinsi DIY pada tahun 2000 meningkat 6,84% dari tahun 1999 dengan luas panen 137,8 ribu Ha menghasilkan 654,3 ribu ton, pada subsektor sayur-sayuran panen terbanyak dari cabe dan bawang merah, sedangkan subsektor buah-buahan komoditas buah salak menghasilkan hasil panen yang terbanyak yaitu 46,19 ribu ton dari 3.004.870 pohon yang ada, komoditas salak yang diproduksi adalah salak pondoh yang dibudidayakan di Kabupaten Sleman. Selain produksi salak produksi buah pisang juga memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebanyak 46,28 ribu ton.

### 3.3.2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian ini termasuk didalamnya kegiatan penggalian, pengambilan segala macam bahan tambang, mineral dan barang galian baik berupa benda padat, cair, maupun gas, akan tetapi untuk daerah Propinsi DIY tambang minyak bumi dan gas maupun tambang non migas tidak ada, hanya ada kegiatan penggalian saja.

Usaha pertambangan bahan galian yang potensi diusahakan di Propinsi DIY adalah bahan galian pasir kali, batu-batuan, tanah liat, andesit, sirtu, batu kapur dan sebagainya yang pada umumnya berada diatas permukaan bumi.

### 3.3.3. Listrik, Gas, Air bersih

Pada sektor ini terbagi tiga sub sektor yaitu sektor listrik, sektor air, dan sektor gas. Di Propinsi DIY hanya terdapat perusahaan listrik dan air minum saja sedangkan perusahaan gas tidak ada.

Pada sektor listrik mencakup pembangkit listrik dan penyaluran tenaga listrik diusahakan oleh perusahaan negara (PLN) maupun perusahaan non PLN seperti pembangkit listrik oleh perusahaan daerah dan tenaga listrik yang diusahakan oleh pihak swasta. Jumlah pelanggan listrik di Propinsi DIY dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 131,82% atau pertumbuhan pertahunnya sebesar 13,18%. Pada tahun 2000 daya yang dibangkitkan adalah 1.023449.266 kwh dan yang terjual sebesar 945.188.646 kwh dengan alokasi menurut jenis pelanggan untuk rumah tangga 93,93%, untuk usaha 3,25%, untuk umum 2,74% dan untuk industri 0,08%.

Untuk sub sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemumian, proses kimiawi lainnya. Pada tahun 2000 tercatat ada 6 perusahaan air minum di



Propinsi DIY dengan jumlah air minum yang disalurkan adalah 21.316.000 m<sup>3</sup> dengan alokasi 86,81% untuk non niaga, 5,67% untuk niaga, 4,2% untuk sosial, 1,03% untuk konsumen dan sisanya 2,2% nilai penyusutan, sedangkan nilai penjualan air minum di tahun 2000 tercatat sebesar Rp. 15.458 juta

### 3.3.4. Industri pengolahan

Pada sektor industri, Propinsi DIY hanya memiliki industri non migas saja. Sektor industri non migas ini dikelompokkan menjadi sektor industri kecil / industri rumah tangga dan sektor industri besar / industri sedang. Pada tabel 3.8 dibawah ini dijelaskan mengenai jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan pengeluaran untuk tenaga kerja menurut klasifikasi industri di Propinsi DIY pada tahun 2000.

Tabel 3.8  
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran untuk Tenaga Kerja  
Industri Besar dan Sedang menurut Klasifikasi Industri di Propinsi DIY  
Tahun 2000

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Pengeluaran untuk TK (000 Rp)
Makanan, Minuman, Tembakau	51	4.807	31.388.309
Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	93	15.925	50.642.396
Kayu, Bambu, Rotan, dan sejenisnya	73	5.332	14.752.427
Kertas, Barang dari Kertas, percetakan	23	1.767	7.822.936
Kimia, Karet, Barang dari Plastik	27	2.219	5.932.688
Barang Galian Bukan Logam	46	2.871	6.827.266
Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	21	2.818	7.877.105
Industri Pengolahan lainnya	13	864	1.777.421
Jumlah	347	36.603	127.020.548

Sumber : BPS, Propinsi DIY.

Jika dilihat dari jumlah perusahaan yang ada di Propinsi DIY, jumlah perusahaan yang ada pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 2,06% dari tahun 1999 yang hanya sebanyak 340 buah perusahaan. Dari besarnya tenaga

kerja yang digunakan maka industri tekstil menggunakan tenaga kerja yang terbanyak yaitu sebanyak 15.925 tenaga kerja begitu juga dari sisi pengeluaran untuk tenaga kerja. sektor industri tekstil ini juga memberikan sumbangan sebesar Rp 50.642.396 atau 39.86% dari total keseluruhan pengeluaran untuk tenaga kerja .

### **3.3.5. Bangunan**

Sektor bangunan mencakup kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau untuk sarana lainnya. Pembangunan ini dilaksanakan secara berencana dan terpola dengan tetap memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, dan lingkungan sekitarnya agar dapat menciptakan keserasian kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

### **3.3.6. Perdagangan, Hotel, Restoran**

Sektor ini terdiri dari tiga sub sektor yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor perdagangan meliputi semua kegiatan jual beli barang untuk tujuan penyaluran serta pendistribusian termasuk ekspor dan impor barang dari maupun ke luar negeri. Untuk sektor hotel mencakup kegiatan penyediaan hotel baik berbintang maupun tak berbintang serta tempat lainnya seperti losmen, motel, dan lain sebagainya untuk dijadikan tempat inap, sedangkan sub sektor restoran mencakup segala usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualannya langsung.

Menurut data yang diperoleh oleh Dinas Perdagangan Propinsi DIY, realisasi ekspor Propinsi DIY tahun 2000 mencapai US \$ 96.778.391,81 atau

turun sebesar 5,71% dari nilai ekspor tahun 1999 begitu juga volume ekspornya juga mengalami penurunan sebesar 1,03% yaitu menjadi sebesar 35.8183,03 ton.

Komoditi ekspor Propinsi DIY dengan volume terbesar pada tahun 2000 adalah dari komoditas mebel kayu yaitu sebesar 12.885.889,80 kg dengan Nilai US\$ 20.502.863,94 jumlah volume ekspor ini mengalami penurunan dari tahun 1999, kemudian komoditas yang menghasilkan volume ekspor terbesar kedua dari komoditas jamur dalam kaleng sebesar 7.675.428,68 kg, sedangkan jika dilihat dari komoditi ekspor yang mempunyai nilai nominal terbesar adalah komoditi pakaian jadi dengan nilai US\$ 25.145.248,28 dengan volume ekspor sebesar 1.720.353,35 kg, data selengkapnya mengenai komoditas ekspor Propinsi DIY pada tahun 2000 terdapat pada tabel 3.9.

Dari sisi impor jenis barang yang diimpor pada tahun 2000 lebih sedikit dibandingkan jenis barang impor tahun sebelumnya, barang-barang tersebut berupa bahan baku, penolong, ataupun peralatan mesin. Volume impor pada tahun 2000 menurun sebesar 49,21% menjadi 2.296,06 dengan nilai impornya menjadi 4,72 juta dollar AS penurunan impor ini sebagai akibat dari depresiasi dari nilai rupiah terhadap dollar AS. Komoditas yang menunjukkan penurunan tajam adalah kapas yaitu sebesar 96,43% akibatnya industri tekstil menurun sebesar 11,04%. Komoditas lain yang mengalami penurunan adalah bahan baku susu yang turun sebesar 63,3%, penurunan ini disebabkan oleh naiknya harga bahan baku susu, dari US\$ 1800/ton menjadi US\$ 2250/ton ditambah lagi depresiasi rupiah terhadap dollar AS yang terus menerus turun (Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober 2000).

Tabel 3.9  
 Realisasi Ekspor Dirinci menurut Jenis Komoditi  
 di Propinsi DIY pada Tahun 1999 dan 2000

Komoditi	1999		2000	
	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
Mebel kayu	12.962.518,80	18.228.705,50	12.885.889,80	20.502.863,94
Jamur dalam kaleng	6.349.799,58	5.534.452,34	7.675.428,68	7.254.682,41
Tekstil	2.588.481,38	8.385.482,58	2.108.364,89	7.609.758,46
Kerajinan tanah liat	2.263.470,11	802.246,28	1.770.870,49	713.632,83
Kerajinan kayu	1.706.242,62	3.103.156,18	1.450.330,00	2.656.468,87
Pakaian jadi	1.511.344,86	21.019.579,90	1.720.353,35	25.145.248,28
Arang batok	1.390.671,80	400.889,21	697.746,60	271.591,60
Kerajinan batu	1.143.906,90	411.323,97	1.481.291,64	637.422,65
teh hijau	989.300,00	601.488,00	75.020,00	499.505,20
Papan kemas	962.760,00	1.230.085,33	959.118,00	1.290.193,18
Kerajinan keramik	937.676,09	328.019,68	575.537,49	193.385,75
Produk tekstil lainnya	882.962,59	10.248.424,70	719.267,20	8.629.563,66
Buncis dalam kaleng	536.605,40	395.360,25	381.929,57	262.947,80
Kerajinan besi	335.986,47	1.170.047,74	229.993,49	404.376,19
Kulit disamak	258.049,50	9.204.262,06	301.658,47	7.387.157,62
mebel bambu	154.552,61	155.217,37	85.940,02	113.359,55
Kerajinan bambu	144.625,64	124.959,82	211.393,91	283.129,57
Jagung muda dalam kaleng	100.500,00	77.620,00	219.079,20	101.524,00
Kerajinan kertas	90.622,65	116.140,33	144.910,53	318.801,69
Kerajinan pandan	87.376,57	455.858,52	146.815,46	700.843,86
Produk jadi kulit	85.921,08	915.145,79	43.563,68	797.722,30
Mebel rotan	72.069,00	109.118,62	4.879,00	92.063,80
Komoditas yang lainnya	662.596,50	8.626.396,80	118.576,53	109.121,60
Jumlah	35.609.793,90	86.349.629,90	35.818.030,00	96.778.391,81

Sumber data : BPS, Dinas Perdagangan Propinsi DIY

Sedangkan pada sub sektor perhotelan pada tahun 2000 Propinsi DIY memiliki 37 hotel berbintang dengan 3.697 kamar dan 6.398 tempat tidur serta 913 hotel melati dengan 10.911 kamar dan 17.723 tempat tidur, dari 684.308 tamu yang menginap tercatat 85.987 orang adalah tamu asing dan sisanya 598.321 orang adalah tamu domestik. jika dilihat dari jenis akomodasi hotel 13.34% menginap di hotel bintang V, 28.43% menginap di hotel bintang IV, 18.94% menginap di hotel bintang III, 4,09% menginap di hotel bintang II, 10,56% menginap di hotel bintang I. dan sisanya 24.63% menginap di hotel melati.

### **3.3.7. Pengangkutan dan Komunikasi**

Dalam sektor ini dibagi menjadi dua sub sektor yaitu sektor pengangkutan dan sektor komunikasi. Sektor pengangkutan termasuk antara lain adalah angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau, angkutan udara, jasa penunjang angkutan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan misalnya seperti terminal, bandara, pergudangan, stasiun. Jasa alat transportasi laut, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan tidak terdapat di Propinsi DIY.

Pada sub sektor komunikasi mencakup kegiatan pos dan jasa penunjang komunikasi seperti kegiatan pemberian informasi kepada pihak lain misalnya fax, telepon, telegram, dan lain sebagainya.

### **3.3.8. Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan**

Pada sektor bank dan lembaga keuangan lain kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyaluran kembali kepada masyarakat.

Pada tahun 2000 jumlah rencana penerimaan Propinsi DIY turun 4,97% dari tahun sebelumnya, hal ini terutama dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak / bukan pajak turun masing-masing 30,31% dan 46,36%. Realisasi penerimaan pada Kabupaten Kulon Progo turun 6,34%, Kabupaten Bantul turun 5,26, Kabupaten Gunung Kidul naik 6,91%, Kabupaten Sleman naik 2,98% dan Kotamadya Yogyakarta naik 2,76 % dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pada tabel 3.10 dipaparkan secara lengkap jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran di Propinsi DIY dan di setiap Kabupaten / Kotamadyanya pada tahun anggaran 1999/2000 dan 2000

Dari sub sektor bank di Propinsi DIY, berdasarkan data dari Bank Indonesia tercatat terjadi penurunan jumlah bank menjadi 80 buah atau turun sebesar 4,76% dan kantor bank menjadi 277 buah atau turun 4,81% dibanding dengan tahun 1999. Total simpanan masyarakat naik 16,86% yang terdiri dari giro 15,27%, deposito 44,55%, dan tabungan 40,18%.

Tabel 3.10  
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran pada Propinsi DIY  
menurut Wilayah Dati II Tahun 1999/2000 – 2000  
( Ribuan Rupiah )

Kabupaten/ kotamadia	Tahun Anggaran			
	1999/2000		2000	
	Penerimaan daerah	Pengeluaran rutin dan pembangunan	Penerimaan daerah	Pengeluaran rutin dan pembangunan
Kulon Progo	80.453.772	77.509.415	75.354.060	71.208.865
Bantul	105.069.073	100.725.081	19.538.767	94.302.853
Gunung Kidul	96.125.809	92.731.984	102.766.125	98.417.273
Sleman	143.357.359	137.472.648	147.632.787	147.632.787
Yogyakarta	105.326.621	93.387.852	108.228.456	89.044.872
Propinsi DIY	180.971.502	158.012.564	168.831.635	163.831.635

Sumber : BPS, Propinsi DIY

### 3.3.9. Jasa-jasa Lainnya

Sektor jasa ini dibagi dua sub sektor yaitu pertama sub sektor jasa pemerintahan umum yang mencakup semua departemen maupun non departemen, lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan . Sub sektor yang kedua jasa swasta yang dibagi menjadi tiga yaitu pertama jasa sosial kemasyarakatan seperti jasa pendidikan, kesehatan, penelitian, yayasan, tempat ibadah, kedua jasa hiburan dan rekreasi seperti jasa gedung bioskop, studio radio, museum, taman hiburan, perpustakaan, studio televisi, dan yang terakhir jasa perorangan dan rumah tangga yang meliputi jasa perbengkelan sepeda motor, reparasi jam, televisi, radio, jasa pembantu rumah tangga, penjaga malam, tukang cukur, tukang jahit, dan sebagainya.

## 3.4 Keadaan Sosial

### 3.4.1. Pendidikan

Propinsi DIY yang menyandang predikat kota pelajar sudah semestinya mendapat tantangan dari dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia, kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah dengan prasarananya, pengajar, dan keterlibatan anak didik harus dipersiapkan secara baik sejak sekarang.

Berdasarkan data yang diperoleh BPS Propinsi DIY pada tahun 2000 di Propinsi DIY ada 5.208 sekolahan 50.456 guru dan 664.236 murid didik. Dengan perincian sekolahan TK sebanyak 1.855 buah dengan 4.052 orang guru dan

62.704 murid didik, SD terdapat 2.400 sekolah dengan 19.865 guru dan 305.748 murid didik, SLTP terdapat 536 sekolah dengan 13.003 guru dan 149.984 murid, SLTA terdapat 225 sekolah dengan 7.149 guru dan 81.369 murid, untuk SMK terdapat 145 sekolah dengan 5.696 guru dan 62.172 murid, SLB terdapat 47 sekolah dengan 691 guru dan 2.259 murid. Pada tingkat perguruan tinggi negeri yaitu UGM, UNY, IAIN, ISI, STPN, dan ATK terdaftar 73.762 orang mahasiswa dengan 3.879 orang dosen tetap dan 1.494 orang dosen tak tetap, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 154.152 orang dengan 10.236 orang dosen pengajar.

#### **3.4.2. Agama**

Komposisi penduduk menurut agama yang dianut masyarakat Propinsi DIY pada tahun 2000 tercatat dari 3.293.714 pemeluk agama, agama Islam merupakan mayoritas terbesar dengan pemeluk agama Islam sebanyak 3.032.851 orang atau sebesar 92,14%, pemeluk agama Kristen sebanyak 89.259 orang atau 2,71%, pemeluk agama Katholik sebanyak 158.098 orang atau 4,8%, pemeluk agama Budha sebanyak 6.258 orang atau 0,17%, pemeluk agama Hindu sebanyak 5.599 orang atau 0,19%, dan sisanya pemeluk Kepercayaan lain sebesar 1.646 orang atau 0,05%.

#### **3.4.2. Pariwisata**

Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, dengan demikian pariwisata merupakan salah satu produk andalan bagi Propinsi DIY. Sektor pariwisata tidak terlepas dari situasi politik yang ada saat ini, jika situasi politik sedang tidak dapat memberikan rasa aman dan tenteram maka para



wisatawan tidak akan tertarik untuk datang berkunjung. pemecahannya adalah Pemerintah Pusat maupun Daerah bersama masyarakat harus berupaya menjaga kondisi politik di daerah setempat agar tidak mengganggu keamanan dan ketentraman daerah.

Jenis tujuan wisata yang sering dikunjungi wisatawan adalah obyek-obyek wisata yang mampu menyerap 76,7% wisatawan, baik wisatawan asing (wisman) maupun wisatawan dalam negeri (wisnus). diantaranya adalah wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul dan obyek wisata Kaliurang di Kabupaten Sleman. Kunjungan wisatawan ke musium dan tempat rekreasi pada tahun 2000 mengalami penurunan dari tahun 1999, hal ini dikarenakan antara lain kurang adanya perawatan dan pengembangan musium-musium dan tempat rekreasi yang ada karena keterbatasan dana anggaran dari pihak pengelola.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### 4.1. Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu atau *time series* yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan seperti data yang diterbitkan oleh BPS, Bappeda, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan obyek yang diteliti dengan periode penelitian mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2000, variabel pengamatannya meliputi :

1. PDRB Propinsi DIY tahun 1994 – 2000.
2. PDRB Kabupaten dan Kotamadya yang ada di Propinsi DIY tahun 1994 – 2000.
3. PDB Indonesia tahun 1994 – 2000.

Data-data diatas tersebut akan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dan potensi dari sektor ekonomi propinsi DIY pada setiap Kabupaten dan Kotamadyanya dengan menggunakan 4 alat analisis yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift Share* (SS) Klasik, analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas, dan analisis *Shift Share* Archelus. Pada analisis LQ dan SS Klasik data PDRB Kabupaten dan Kotamadya tersebut dibandingkan dengan data PDRB Propinsi DIY, sedangkan dalam analisis SS Esteban-Marquillas dan analisis SS Arcelus membandingkan data PDRB Propinsi DIY dengan data PDB Indonesia. Dari hasil alat-alat analisis diatas dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang mempunyai spesialisasi dan keunggulan kompetitif sehingga dapat dijadikan sektor unggulan di setiap Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi DIY.

## 4.2. Perkembangan PDRB Propinsi DIY

Laju pertumbuhan pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui dan melihat perkembangan dan pertumbuhan struktur perekonomian suatu daerah, perkembangan pertumbuhan sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut. Pada tabel 4.1 berikut ini akan dijelaskan mengenai data perkembangan PDRB Propinsi DIY dan laju pertumbuhannya pada tahun 1997 hingga tahun 2000.

Tabel 4.1

**PDRB Propinsi DIY dan Laju Pertumbuhannya**  
menurut Lapangan Usaha atas Harga Konstan 1993 Tahun 1997 – 2000  
(Juta Rupiah)

Sektor	1997		1998		1999		2000	
	PDRB	Growth (%)	PDRB	Growth (%)	PDRB	Growth (%)	PDRB	Growth (%)
Pertanian	822446	3.36	778139	- 5.38	817810	- 5.50	901380	10.22
Pertambangan Penggalian	71548	2.27	60251	- 15.79	60476	0.37	60555	0.13
Industri Pengolahan	701976	1.34	659816	- 6.01	682440	3.43	66115	- 2.69
Listrik Gas Air Bersih	31374	8.58	31429	0.18	35344	12.46	38128	7.88
Bangunan	552853	3.76	371345	- 32.83	383269	3.21	400859	4.59
Perdagangan Hotel Restoran	828299	3.88	742580	- 10.35	761008	2.48	791621	4.02
Pengangkutan Komunikasi	593459	6.83	541280	- 8.79	552812	2.13	609593	10.27
Keuangan Sewa, Jasa	567452	8.89	527472	- 7.05	531007	0.67	524512	- 1.22
Jasa-jasa lainnya	1116950	4.67	977631	- 12.47	1000279	2.32	1026947	2.67
Jumlah	5286367	3.51	4689943	- 11.18	4824445	0.99	5017710	4.01

Sumber data : BPS Propinsi DIY dalam angka berbagai edisi, data diolah

Dari tabel 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB Propinsi DIY pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar - 11,18 % ini disebabkan oleh pada pertengahan tahun 1997 perekonomian Propinsi DIY terpengaruh dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS, dan kondisi ini semakin memburuk pada tahun 1998 sehingga pertumbuhan PDRB-nya negatif. Akan tetapi pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Propinsi DIY mulai membaik, ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan yang positif dan pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi ini naik lagi dari tahun 1999 sebesar 0,99% menjadi

4,01%, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional pertumbuhan ekonomi Propinsi DIY masih sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang pada tahun 2000 sebesar 4,77%.

Sementara itu penjelasan tentang perubahan PDRB Propinsi DIY atas harga konstan selama periode 1994 – 2000 dapat dilihat pada tabel 4.2, dalam tabel tersebut dapat kita ketahui adanya kenaikan PDRB Propinsi DIY yang pada tahun 1994 hanya sebesar 4.357.906 juta naik sebesar 659.804 juta menjadi sebesar 5.017.710 juta di tahun 2000 atau berubah sebesar 15,14% selama kurun waktu 7 tahun.

**Tabel 4.2**  
Perubahan PDRB Propinsi DIY dengan Harga Konstan 1993  
Periode 1994 – 2000 (Juta Rupiah)

Sektor	PDRB		Perubahan	
	1994	2000	Absolut	Persen
Pertanian	716.889	901.380	184.491	25.73
Pertambangan & Penggalian	64.045	60.555	-3.490	-5.44
Industri Pengolahan	601.917	664.115	62.198	10.33
Listrik, Gas, & Air Bersih	28.327	38.128	9.801	34.59
Bangunan	422.300	400.859	-21.441	-5.07
Perdagangan, Hotel, & Restoran	676.167	791.621	115.454	17.07
Pengangkutan & Komunikasi	502.371	609.593	107.222	21.34
Keuangan, sewa, Jasa perusahaan	444.862	524.512	79.650	17.90
Jasa-jasa lainnya	901.028	1.026.947	125.919	13.97
<b>Total</b>	<b>4.357.906</b>	<b>5.017.710</b>	<b>659.804</b>	<b>15.14</b>

Sumber data : Tabel 4.1, data diolah

Dari tabel 4.2 juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 secara keseluruhan di semua sektor ekonomi mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 1994, kecuali pada dua sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu pertama pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan 3.490 juta atau berubah sebesar 5,44% dari sebesar 64.045 juta di tahun 1994 turun menjadi sebesar 60.555 juta pada tahun 2000, sektor yang kedua adalah sektor bangunan yang mengalami penurunan 21.441 juta atau berubah sebesar 5,07% dari tahun 1994. Dari kesembilan sektor ekonomi yang ada, sektor perdagangan; hotel; dan restoran

mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dengan kenaikan sebesar 68.453 juta selama kurun waktu 7 tahun.

Peranan sektor primer, sekunder, dan tersier pada kontribusinya terhadap PDRB masing-masing Kabupaten dan kotamadya di Propinsi DIY periode tahun 1997 hingga tahun 2000 masih tetap didominasi oleh sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan; hotel; restoran, sektor pengangkutan; komunikasi, sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lain yakni sebesar diatas 50% pada tiap tahunnya, hal ini berarti bahwa sektor tersier ini sangat harus diperhatikan perkembangannya karena lebih dari separuh pertumbuhan PDRB Propinsi DIY berasal dari peranan sektor ini, sedangkan pada sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian peranan tiap tahunnya berfluktuatif dan pada tahun 2000 peranan sektor ini terhadap PDRB Propinsi DIY sama besar dengan peranan sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik; gas; air bersih, dan sektor bangunan. Data lengkap mengenai perkembangan peran masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan di Propinsi DIY dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3  
Perkembangan Peranan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier  
Terhadap PDRB Propinsi DIY Tahun 1997 – 2000  
(Dalam persen)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier	Jumlah
1997	19,83	24,30	55,87	100
1998	21,85	23,60	54,55	100
1999	23,45	23,69	52,86	100
2000	22,43	22,43	53,14	100

Sumber: BPS Propinsi DIY

### 4.3 Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Hasil analisis pada penelitian ini dimulai dengan menganalisis kondisi struktur ekonomi Propinsi DIY pada setiap Dati II yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotamadya Yogyakarta. Kelima Kabupaten dan Kotamadya tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis *Shift Share* Klasik dan *Location Quotient* dengan tujuan untuk melihat melihat spesialisasi regional (wilayah) di setiap Dati II Propinsi DIY agar dapat berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi regional berdasarkan *comparative advantage* yang dimilikinya dengan asumsi bahwa **analisis *Location Quotient*** merupakan **analisis pendekatan dari sisi produksi** sehingga apabila dari hasil analisis tersebut dilihat dari sisi pendekatan marketing belum tentu akan mempunyai nilai lebih jika dikembangkan atau dijadikan unggulan bagi daerah tersebut sehingga perlu diperhatikan juga keadaan dari lingkungan yang ada di sekitar daerah tersebut. Analisis yang berikutnya yaitu menganalisis kondisi perekonomian daerah Propinsi DIY secara umum terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan menggunakan analisis *Shift Share* Klasik dan analisis *Location Quotient*, analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas, analisis *Shift Share* Arcelus.

#### 4.3.1. Analisis *Shift Share* Klasik dan *Location Quotient* (LQ) Tiap Dati II

Hasil analisis *Shift Share* Klasik dan LQ untuk tiap-tiap Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi DIY akan disajikan dari tabel 4.4 hingga tabel 4.8 dibawah ini, dimulai secara berturut-turut dengan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan terakhir Kotamadya Yogyakarta.

Tabel 4.4  
 Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient  
 di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	17639.31	12343.19	-34163.30	-4180.81	1.4002	1.6611
Pertambangan Penggalian	4855.67	-6603.32	-33915.70	-35663.30	4.3145	0.7446
Industri Pengolahan	13060.56	-4146.72	-84289.60	-75375.70	1.2348	0.3390
Listrik Gas Air Bersih	195.008	250.63	604.99	1050.63	0.3917	0.8201
Bangunan	5604.06	-7483.34	-16366.10	-18245.30	0.7551	0.9807
Perdagangan Hotel Restoran	8339.18	1065.44	-26306.20	-16901.60	0.7018	0.7021
Pengangkutan Komunikasi	5922.77	2426.47	-2734.77	5614.47	0.6709	1.0393
Keuangan Sewa, Jasa	3687.89	673.26	-1310.90	3050.26	0.4717	0.7633
Jasa-jasa lainnya	17273.52	-1329.54	-18842.50	-32898.50	1.0909	1.2034
Total	76577.98	-2803.92	-247324	-173550		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Dari hasil analisis tabel 4.4, terlihat bahwa pertumbuhan PDRB di wilayah Kabupaten Kulon Progo, pengaruh pertumbuhan Propinsi DIY banyak berpengaruh positif terhadap seluruh sektor ekonomi yang ada. Sektor yang mempunyai peranan besar dalam komponen pertumbuhan nasional ini adalah sektor pertanian, dan jasa-jasa lain. Sedangkan pengaruh bauran industri secara keseluruhan justru bernilai negatif, artinya pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo justru menurun karena pengaruh dari komponen bauran industri, pengaruh yang negatif tersebut ditunjukkan oleh sektor pertambangan; penggalian, industri pengolahan, bangunan, dan jasa-jasa lainnya.

Untuk analisis spesialisasi regional yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan analisis LQ, diperoleh bahwa dalam dua periode tersebut hanya ada dua sektor yang secara konsisten menjadi spesialisasi Kabupaten Kulon Progo yaitu sektor pertanian ( sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian karena masih luasnya lahan pertanian yang ada )

dan sektor jasa-jasa lainnya ( seperti banyaknya gaji pegawai negeri yang ada ) sedangkan pada sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan perkembangan nilai yang positif dengan menunjukkan adanya spesialisasi dari tidak ada pada periode sebelumnya.

Tabel 4.5

Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient  
di Kabupaten Bantul Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PIRIB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	25895.97	18120.82	-13407	30609.82	1.3725	1.2080
Pertambangan Penggalian	1608.06	-2186.83	-2143.06	-2721.83	0.9540	0.9882
Industri Pengolahan	14850.60	-4715.07	16702.40	26837.93	0.9374	1.1581
Listrik Gas Air Bersih	631.95	812.22	-814.96	629.22	0.8476	0.6210
Bangunan	12921.26	-17254.30	-12271.30	-16604.30	1.1625	1.2727
Perdagangan Hotel Restoran	17915.47	2288.93	3319.52	23523.94	1.0067	1.0460
Pengangkutan Komunikasi	11177.39	4579.22	-15006.40	750.22	0.8453	0.6812
Keuangan Sewa, Jasa	6617.56	1208.10	2225.43	10051.11	0.5652	0.5944
Jasa-jasa lainnya	23074.71	-1776.06	-5109.71	16188.94	0.9730	0.9842
<b>Total</b>	<b>114693</b>	<b>1077.059</b>	<b>-26505</b>	<b>89265.06</b>		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Dari hasil analisis tabel 4.5, pertumbuhan Propinsi DIY banyak berpengaruh positif terhadap seluruh sektor ekonomi Kabupaten Bantul. Hampir pada seluruh sektor ekonomi yang ada memberikan peranan yang sama besarnya. Sedangkan pengaruh bauran industri secara keseluruhan bernilai positif, pengaruh bauran industri yang bernilai negatif ditunjukkan oleh empat sektor yaitu sektor pertambangan; penggalian, industri pengolahan, bangunan, dan jasa-jasa lainnya. Sedangkan dari aspek keunggulan kompetitifnya hanya pada sektor industri pengolahan, perdagangan; hotel; restoran, dan keuangan; sewa; jasa perusahaan saja yang memiliki keunggulan kompetitif yang positif.



Spesialisasi regional yang dimiliki Kabupaten Bantul, terdapat pada tiga sektor ekonomi saja yaitu pada sektor pertanian ( masih luasnya lahan pertanian ), bangunan, sektor perdagangan, hotel, restoran ( terdapatnya tempat wisata pantai parang tritis dan lainnya, juga merupakan dampak dari adanya industri rumah tangga ) yang memiliki spesialisasi, sedangkan pada sektor industri pengolahan didapatkan hasil angka yang memperlihatkan adanya tingkat spesialisasi dari tidak ada spesialisasi pada periode sebelumnya ( adanya kerajinan gerabah di Kasongan ).

**Tabel 4.6**  
**Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient**  
**di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000**

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	32753.06	22919.10	98261.94	153934.10	1.8115	2.0779
Pertambangan Pengegalian	2021.09	-2748.52	1468.91	741.48	1.2512	1.4995
Industri Pengolahan	13724.46	-4357.52	6968.54	16335.48	0.9040	0.9040
Listrik Gas Air Bersih	199.55	256.47	642.45	1098.47	0.2793	0.3054
Bangunan	12046.30	-16085.90	-16514.30	-20553.90	1.1310	1.0102
Perdagangan Hotel Restoran	12287.64	1569.91	5904.36	19761.91	0.7205	0.6767
Pengangkutan Komunikasi	12614.52	5167.99	-1453.52	16328.99	0.9956	0.8357
Kuangan Sewa, Jasa	4777.09	872.11	3890.90	9540.11	0.4257	0.4135
Jasa-jasa lainnya	19482.20	-1499.54	-4490.20	13492.46	0.8573	0.7544
<b>Total</b>	<b>109905.90</b>	<b>6094.077</b>	<b>94679.09</b>	<b>210679.1</b>		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Dari hasil analisis tabel 4.6, pada wilayah kabupaten Gunung Kidul, pengaruh pertumbuhan Propinsi DIY banyak berpengaruh positif terhadap seluruh sektor ekonomi yang ada. Sedangkan pengaruh bauran industri secara keseluruhan bernilai positif, ini berarti adanya bauran industri peningkatan PDRB karena adanya faktor bauran industri. Dari aspek keunggulan kompetitifnya secara keseluruhan juga menunjukkan nilai yang positif, hanya

pada sektor bangunan, pengangkutan, komunikasi dan jasa-jasa lain tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Melalui analisis LQ spesialisasi regional yang konsisten dimiliki Kabupaten Gunung Kidul dalam dua periode tersebut adalah pada sektor pertanian ( banyaknya lahan pertanian yang ada ), sektor pertambangan, penggalian ( tambang batu kapur dan batu kalsit ), dan sektor bangunan, sedangkan enam sektor lainnya sama sekali tidak memiliki spesialisasi di Kabupaten Gunung kidul

**Tabel 4.7**  
**Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient**  
**di Kabupaten Sleman Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000**

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	29910.902	20930.286	-21650.901	29190.286	0.9726	0.7891
Pertambangan Penggalian	1144.764	-1556.786	-2368.764	-2780.786	0.4166	0.3616
Industri Pengolahan	30405.993	-9653.899	3222.007	23974.100	1.1775	1.2201
Listrik Gas Air Bersih	882.533	1134.271	3648.466	5665.271	0.7262	0.9391
Bangunan	21869.84	-29203.698	-15696.840	-23030.698	1.2072	1.2986
Perdagangan Hotel Restoran	30017.036	3835.073	38435.963	72288.073	1.0348	1.1644
Pengangkutan Komunikasi	19241.923	7883.138	9681.077	36806.138	0.8928	0.8845
Keuangan Sewa, Jasa	22451.837	4098.819	-2591.836	23958.819	1.1765	1.1080
Jasa-jasa lainnya	31016.907	-2387.366	17429.092	46058.633	0.8024	0.8525
<b>Total</b>	<b>186941.74</b>	<b>-4920.161</b>	<b>30108.263</b>	<b>212129.84</b>		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Dari hasil analisis tabel 4.7 terlihat bahwa pertumbuhan PDRB di wilayah Kabupaten Sleman, pengaruh pertumbuhan Propinsi DIY banyak berpengaruh positif terhadap seluruh sektor ekonomi yang ada. Sektor yang mempunyai peranan besar dalam komponen pertumbuhan nasional ini adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa lain dan sektor perdagangan, hotel restoran. Sedangkan pengaruh bauran industri secara keseluruhan bernilai

negatif, artinya pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman secara keseluruhan justru menurun akibat pengaruh bauran industri. Aspek keunggulan kompetitifnya secara keseluruhan menunjukkan nilai yang positif

Spesialisasi regional yang dimiliki Kabupaten Sleman berdasarkan analisis LQ, dapat diketahui ada empat sektor yang memiliki spesialisasi di Kabupaten Sleman yaitu sektor industri pengolahan ( kerajinan kayu di Ngaglik, kerajinan bambu di Prambanan ), sektor bangunan, sektor perdagangan; hotel; restoran ( banyaknya usaha kos-kosan, rumah makan di Condong catur ) dan sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan ( imbas dari sektor perdagangan: hotel).

Tabel 4.8

Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient  
di Kotamadya Yogyakarta Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	2340.553	1637.81	-5508.55	-1530.18	0.0808	0.0504
Pertambangan Penggalian	67.072	-91.212	-233.07	-257.21	0.0259	0.0169
Industri Pengolahan	19090.973	-6061.382	6974.03	20003.61	0.7852	0.8474
Listrik Gas Air Bersih	2294.980	2949.611	740.02	5984.61	2.0059	1.7649
Bangunan	15912.550	-21248.68	-38740.55	-44076.68	0.9329	0.7592
Perdagangan Hotel Restoran	33815.003	4320.31	25187.99	63323.31	1.2382	1.3193
Pengangkutan Komunikasi	27104.327	11104.25	16536.67	54745.25	1.3358	1.3511
Keuangan Sewa, Jasa	29819.453	5443.86	-1043.45	34219.86	1.6596	1.5919
Jasa-jasa lainnya	45571.819	-3507.66	14047.18	56111.34	1.2522	1.2989
<b>Total</b>	<b>176016.733</b>	<b>-5453.09</b>	<b>17960.26</b>	<b>188523.91</b>		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Dari hasil analisis tabel 4.8, terlihat bahwa untuk pertumbuhan PDRB di wilayah Kotamadya Yogyakarta, pengaruh pertumbuhan Propinsi DIY banyak berpengaruh positif terhadap seluruh sektor ekonomi yang ada. Sektor yang berperan besar dalam komponen pertumbuhan nasional ini adalah sektor perdagangan; hotel; restoran, dan sektor jasa-jasa lain. Pengaruh bauran industri

secara keseluruhan bernilai negatif, pengaruh bauran industri yang bernilai negatif ditunjukkan oleh empat sektor yaitu sektor pertambangan; penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Aspek keunggulan kompetitifnya secara keseluruhan menunjukkan nilai positif, pada sektor pertanian, sektor pertambangan; penggalian, sektor bangunan dan sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kotamadya Yogyakarta.

Untuk analisis spesialisasi regional yang dimiliki Kotamadya Yogyakarta dengan analisis LQ, diperoleh lima sektor yang memiliki spesialisasi yaitu pada sektor listrik; gas; air bersih, sektor perdagangan; hotel; restoran, sektor pengangkutan; komunikasi, sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya.

#### 4.3.2. Analisis *Shift Share* Klasik dan *Location Quotient* (LQ) Propinsi DIY

Tabel 4.9

Hasil analisis Shift Share Klasik dan Location Quotient  
Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000

Sektor	Pertumbuhan Nasional (Nij)	Bauran Industri (Mij)	Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB riil (Dij)	LQ 1994	LQ 2000
Pertanian	44060.34	42272.92	140430.70	226763.90	1.0753	1.0394
Pertambangan Penggalian	3936.23	-22981.29	-7426.24	-26471.30	0.1282	0.1033
Industri Pengolahan	36994.10	126403.76	25203.90	188601.80	0.5008	0.6260
Listrik Gas Air Bersih	1740.99	20803.10	8060.009	30604.10	0.4544	0.6576
Bangunan	25954.76	-59740.39	-47395.80	-81181.40	1.3354	1.4040
Perdagangan Hotel Restoran	41557.54	5226.58	73896.46	120680.60	0.9861	0.9768
Pengangkutan Komunikasi	30875.96	50804.25	76346.04	158026.30	1.6497	1.7145
Keuangan Sewa, Jasa	27341.43	-78124.59	52308.57	1525.40	1.5185	1.2376
Jasa-jasa lainnya	55377.61	42503.94	70541.39	168422.90	2.1412	2.2592
<b>Total</b>	<b>267839</b>	<b>127168.28</b>	<b>391965</b>	<b>786972.3</b>		

Sumber data : Tabel 4.2, data diolah

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9, terlihat bahwa pertumbuhan PDRB Propinsi DIY sebesar 267.839 juta adalah dikarenakan pengaruh pertumbuhan PDB Nasional karena PDRB Propinsi DIY meskipun kenaikan jumlah PDRB Propinsi DIY yang riil seharusnya dapat mencapai 78.6972,3 juta. Sedangkan dari pengaruh keunggulan kompetitif yang tidak setara dengan pertumbuhan nasional, atau perkembangan sektor-sektor tersebut lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional rata-rata hal ini ditunjukkan oleh sektor pertambangan; penggalian dan sektor bangunan saja, sedangkan enam sektor lainnya berkembang lebih cepat dari laju pertumbuhan Nasional rata-rata

Dari analisis spesialisasi regional dengan menggunakan analisis LQ, ditemukan bahwa sektor yang sebaiknya menjadi spesialisasi bagi propinsi DIY adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan, komunikasi, sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya karena tingkat spesialisasinya berada di atas tingkat spesialisasi nasional ( $LQ > 1$ )

#### 4.3.3. Analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas (E-M)

Dalam analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas, analisis *Shift Share* Klasik dimodifikasi kembali dengan mengubah pengaruh keunggulan kompetitif ( $C_{ij}$ ), dimana  $C_{ij} = \{E_{ij}(\tau_{ij} - \tau_{in})\}$  menjadi pengaruh persaingan ( $C'_{ij}$ ), dimana  $C'_{ij} = \{E'_{ij}(\tau_{ij} - \tau_{in})\}$ . Selain itu analisis ini juga menambahkan pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ) yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen spesialisasi ( $E'_{ij} - E_{ij}$ ) dan komponen keunggulan kompetitif ( $\tau_{ij} - \tau_{in}$ ). Tabel 4.10 berikut ini menunjukkan hasil dari analisis *Shift Share* E-M pada sektor ekonomi Propinsi DIY tahun 1994 dan tahun 2000

Tabel 4.10  
 Hasil analisis Esteban-Marquillas  
 Propinsi DIY Tahun 1994 dan 2000

Sektor	$C'_{ij}$	$E_{ij}-E'_{ij}$	$F_{ij}-F'_{in}$	$A_{ij}$	Arti
Pertanian	94433.408	27200.43	0.13692	27200.296	K,S
Pertambangan & Penggalian	150474.68	-555505.90	0.24288	-555506.147	K,TS
Industri Pengolahan	-161638.10	-359474.75	-0.16812	-359474.578	TK,TS
Listrik, Gas, & Air Bersih	-19375.61	-14743.64	-0.44986	-14743.189	TK,TS
Bangunan	8792.38	121519.75	0.02923	121519.718	K,S
Perdagangan, Hotel, & Restoran	70294.60	-15998.07	0.10156	-15998.169	K,TS
Pengangkutan & Komunikasi	14896.82	209371.54	0.05084	209371.492	K,S
Keuangan,sewa, Jasa perusahaan	105389.67	85414.62	0.29319	85414.329	K,S
Jasa-jasa lainnya	12409.90	502216.01	0.03112	502215.979	K,S
Jumlah	275677.76	-7.567E+10	0.26776	-0.26776	

Sumber data: Tabel 4.2, data diolah

Keterangan K : Kompetitif TK : Tidak Kompetitif  
 S : Spesialisasi TS : Tidak Spesialisasi

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* E-M pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk komponen pengaruh pertumbuhan nasional ( $N_{ij}$ ) dan komponen bauran industri ( $M_{ij}$ ) tidak ada perbedaan dengan teknik analisis *Shift Share* klasik, analisis *Shift share* E-M ini membantu mengatasi kekurangan analisis *shift Share* Klasik dalam hal spesialisasi wilayah, yaitu dengan menentukan pengaruh alokasi ( $A_{ij}$ ) seperti yang terlihat dalam tabel diatas.

Menurut analisis *Shift share* E-M ini, sektor-sektor ekonomi Propinsi DIY secara keseluruhan memiliki pengaruh persaingan ( $C'_{ij}$ ) yang positif, hal ini berarti sektor-sektor ekonomi tersebut mampu untuk bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dari tabel diatas dapat hanya diketahui ada dua sektor ekonomi yang mempunyai pengaruh nilai persaingan yang negatif, yaitu pada sektor industri pengolahan, dan sektor listrik; gas; air bersih yang masing-

masing menyebabkan penurunan pendapatan atau output secara berurutan sebesar 161.638,1 juta, dan 19.375,61 juta.

Selanjutnya jika dilihat dari komponen spesialisasinya, dapat diketahui dari tujuh sektor yang memiliki keunggulan kompetitif positif hanya terdapat lima sektor saja yang memiliki spesialisasi yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan, komunikasi, sektor keuangan, sewa, jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Untuk sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi seperti pada sektor industri pengolahan, dan sektor listrik gas air bersih menjadi layak untuk tidak menjadi prioritas ekonomi Propinsi DIY untuk dikembangkan .

#### 4.3.4. Analisis *Shift Share* Arcelus

Dalam analisis *Shift Share* Arcelus dengan menghitung angka perbedaan antara tambahan pendapatan atau output yang diharapkan dan selisih pendapatan riil dengan pendapatan yang diharapkan yang masing-masing diberi bobot yang sama (berupa selisih antara laju pertumbuhan regional dengan laju pertumbuhan nasional) maka akan diperoleh pengaruh pertumbuhan regional (Rij), pengaruh ini merupakan dampak yang ditimbulkan pertumbuhan intern suatu wilayah ketika terjadi perubahan pendapatan di wilayah itu.

Komponen lainnya yaitu (RIij) dinamakan pengaruh bauran industri regional yang mengukur sampai seberapa jauh suatu sektor tertentu di suatu wilayah memiliki keunggulan kompetitif.

Tabel 4.11 berikut ini memaparkan hasil dari perhitungan analisis *Shift Share* Arcelus pada Propinsi DIY pada tahun 1994 dan 2000:

Tabel 4.11  
 Hasil perhitungan analisis *Shift Share* Arcelus  
 Propinsi DIY tahun 1994 dan 2000

Sektor	Rij	Rij
Pertanian	64479,4608	74347,2117
Pertambangan, Peggalian	5760,4274	-212518,729
Industri Pengolahan	54138,4839	46555,612
Listrik, Gas, Air Bersih	2547,8277	16339,046
Bangunan	37983,1136	-68188,018
Perdagangan, Hotel, Restoran	60816,7842	13203,326
Pengangkutan, Komunikasi	45184,9745	9987,441
Keuangan, sewa, Jasa perusahaan	40012,4174	27296,449
Jasa-jasa lainnya	81041,5554	-34191,106
Total	391965,0449	-127168,767

Sumber data : Tabel 4 2, data diolah

Hasil dari analisis *Shift Share* Arcelus menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan wilayah Propinsi DIY bernilai positif hal ini dapat diartikan bahwa keterkaitan antar sektor yang ada di Propinsi DIY sangat kuat, atau bisa juga diartikan bahwa perkembangan permintaan akan produk-produk yang dihasilkan sektor-sektor di Propinsi DIY cukup tinggi.

Sedangkan jika dilihat pengaruh bauran industri regional hasil analisis pada tabel diatas memperlihatkan adanya pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan pendapatan Propinsi DIY di tiga sektor yaitu sektor pertambangan peggalian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa lainnya. Sedangkan enam sektor yang lainnya yaitu pada sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik; gas; air bersih, sektor perdagangan; hotel; restoran, sektor pengangkutan; komunikasi, dan sektor keuangan; sewa; jasa perusahaan menunjukkan pengaruh yang positif.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis spesialisasi regional pada tiap Dati II Propinsi DIY dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Struktur perekonomian Propinsi DIY pada masing-masing Kabupaten dan Kotamadyanya selama periode penelitian masih tetap didominasi oleh sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan: hotel: restoran, sektor pengangkutan: komunikasi, sektor keuangan: sewa: jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lain yakni sebesar diatas 50% pada tiap tahunnya seperti yang terdapat pada pembahasan BAB IV diatas, hal ini berarti bahwa sektor tersier ini sangat harus diperhatikan perkembangannya karena lebih dari separuh pertumbuhan PDRB Propinsi DIY berasal dari peranan sektor ini.
2. Pembangunan Propinsi DIY pada setiap Kabupaten dan Kotamadyanya perlu lebih diprioritaskan kepada sektor-sektor yang memiliki spesialisasi yang besar dan atau sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi
3. Sektor-sektor yang menjadi spesialisasi antar Dati II memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Berdasarkan analisis *Location Quotient* yang juga merupakan pendekatan produksi maka didapatkan spesialisasi masing-masing Dati II di Propinsi DIY seperti yang tercantum pada tabel berikut ini

Kabupaten Kotamadya	Sektor spesialisasi
Kulon Progo	Pertanian, Pengangkutan, komunikasi, Jasa-jasa lainnya.
Bantul	Pertanian, Industri pengolahan, Bangunan, Perdagangan, hotel, restoran.
Gunung Kidul	Pertanian, Pertambangan, penggalian, Bangunan.
Sleman	Industri pengolahan, Bangunan, Perdagangan, hotel, restoran, Keuangan, sewa, jasa perusahaan.
Yogyakarta	Listrik, gas, air bersih, Perdagangan, hotel, restoran, Pengangkutan, komunikasi, Keuangan, sewa, jasa perusahaan, Jasa-jasa lainnya

4. Menurut Hasil dari analisis *Shift Share* Esteban-Marquillas dapat disimpulkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Propinsi DIY terdapat dua sektor ekonomi yang sama sekali tidak mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi yaitu pada sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Oleh karena itu pada kedua sektor tersebut kurang bagus jika menjadi prioritas pengembangan sektor ekonomi.
5. Berdasarkan analisis *Shift Share* Arcelus, keterikatan antar sektor di Propinsi DIY sangat kuat, terutama ada enam sektor ekonomi yang mempunyai pengaruh bauran industri regional positif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas air bersih, sektor perdagangan hotel restoran, sektor pengangkutan komunikasi, dan sektor keuangan sewa jasa perusahaan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dan kesimpulan yang diuraikan diatas maka berikut ini beberapa saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan guna untuk mengambil kebijakan dan strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan di Propinsi DIY berdasarkan sektor unggulan yang menjadi *economy base*.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa hasil dan kesimpulan diatas maka ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini untuk pengembangan daerah Propinsi DIY. Dibawah ini rekomendasi sektor-sektor dan Dati II mana sebaiknya dikembangkan :

Sektor	Kabupaten, Kotamadya
Pertanian	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo
Pertambangan	Gunung Kidul
Perdagangan Hotel Restoran	Bantul, Sleman, Yogyakarta
Pengangkutan Komunikasi	Kulon progo, Yogyakarta
Keuangan Sewa Jasa perusahaan	Sleman, Yogyakarta
Jasa-jasa lainnya	Yogyakarta

2. Dengan melihat sektor yang menjadi sektor unggulan tiap Dati II di Propinsi DIY maka sektor sektor tersebut harus terus dijaga pertumbuhannya jika mungkin dengan mengadakan inovasi-inovasi baru melalui penggunaan teknologi, peningkatan kualitas dari sumberdaya manusianya ataupun dengan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan tersebut.
3. Untuk meningkatkan sektor ekonomi yang bukan merupakan unggulan, perlu dicarikan pemecahannya yaitu mungkin dengan cara bekerja sama dengan pihak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk

menginvestasikan modalnya. dalam hal ini pemerintahan Daerah maupun pemerintahan Pusat harus menciptakan keadaan yang aman agar dapat menarik minat investor.

4. Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah maka pemerintah harus mencari kiat-kiat khusus sesuai dengan ciri khas yang dimiliki masing-masing Dati II di Propinsi DIY misalnya pada sektor pertanian mulai dikembangkan tanaman yang berorientasi ekspor. di sektor industri pengolahan lebih ditingkatkan kegiatan *home industry*. di sektor jasa dengan meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana publik, paket wisata dan sebagainya.
5. Untuk sektor tersier seperti sektor perdagangan; hotel; restoran; sektor pengangkutan; komunikasi; sektor keuangan; persewaan; jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya sebaiknya dalam pengembangannya diserahkan pada mekanisme pasar agar berjalan dengan efisien dan profesional, mengingat peran sektor ini sangat besar bagi pembentukan PDRB Propinsi DIY, sehingga dapat diharapkan lebih berkembang lagi dan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar lagi terhadap PDRB Propinsi DIY pada tahun-tahun mendatang.